

NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Maret | Tahun 2023 No. 47

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Kasus Keluarga Pejabat Pajak

Menggerus Kepercayaan Publik

*pada Ketaatan
Membayar Pajak*

H. Hidayatullah, S.E.



WATAK DEMOKRASI INDONESIA⁽¹⁾

Tiap negara membentuk watak dan karakternya sendiri termasuk dalam menjalankan sistem demokrasi. Terlebih lagi, ketika demokrasi tidak hanya berhenti pada maknanya yang prosedural tapi lebih jauh demokrasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih substansial yaitu kesejahteraan rakyat—dalam seluruh aspeknya, baik material maupun nonmaterial, baik kesejahteraan pikiran, raga, maupun jiwa.

Demokrasi lahir dari pemikiran dan sistem politik Barat. Demokrasi yang lahir di Barat tersebut memiliki karakter dasar sekularistik dan individualistik. Dalam perkembangannya demokrasi berkembang dan tidak bisa diidentikkan dengan demokrasi Barat ketika dipraktekan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Tiap negara membentuk watak dan karakternya sendiri termasuk dalam menjalankan sistem demokrasi. Terlebih lagi, ketika demokrasi tidak hanya berhenti pada maknanya yang prosedural tapi lebih jauh demokrasi dimaksudkan untuk

mencapai tujuan yang lebih substansial yaitu kesejahteraan rakyat—dalam seluruh aspeknya, baik material maupun nonmaterial, baik kesejahteraan pikiran, raga, maupun jiwa.

Demokrasi Indonesia, jelas dikatakan oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi Barat. Menurut Bung Hatta, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi barat yang mendasarkan pada nilai individualisme. Perbedaan itu antara lain karena demokrasi Indonesia berdasar kepada rasa kebersamaan, seperti kehidupan dalam keluarga.

Bung Karno: "Tidak ada dua bangsa yang cara

berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri-sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya." (Soekarno, 1958).

Di antara karakter khas bangsa Indonesia adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan atau negara yang religius.

Dengan paham tersebut, kita tidak menganut paham sekuler yang ekstrim, yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang-ruang privat/komunitas seperti di Barat.

Meski kita juga bukan negara agama, dalam arti hanya satu agama yang diakui menjadi dasar negara Indonesia. Menjadi relegius nation state maknanya adalah negara melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Lebih dari itu agama didorong untuk memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan norma dan etika sosial.

Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai watak kebangsaan Indonesia. Dorongan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang diantara sesama manusia, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat diantara bangsa-bangsa (Asshidiqie, Jimly, 2005).



Kasus Keluarga Pejabat Pajak

Gerus Kepercayaan Masyarakat pada Institusinya



Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi mengerus trust publik, ketidakpatuhan pajak bisa bisa meningkat naik.

H. HIDAYATULLAH, S.E.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (25/02) --- Anggota DPR RI dari Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah menyayangkan kasus yang melibatkan keluarga pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu yang berdampak menggerus kepercayaan rakyat terhadap integritas institusi perpajakan.

"Aksi pamer harta keluarga pejabat DJP apalagi disaat masyarakat kesulitan ekonomi paska pandemi amat disayangkan," ujarnya di Medan, Sumatera Utara (25/02/2023).

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan DJP Kemenkeu terkait pembenahan internal, menurutnya masih segar kasus Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang didakwa menerima gratifikasi puluhan milyar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ini seolah belum ada pembenahan secara internal dan perbaikan sistem pengawasan oleh pimpinan," katanya.

Hidayatullah setuju jika KPK akan mengklarifikasi harta pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut.

"Meskipun idealnya menyeluruh tidak hanya berhenti pada yang bersangkutan, tetapi para pejabat pajak yang hartanya dinilai tidak wajar perlu

ditelusuri," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Utara ini menyebut bahwa gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya kontraproduktif dengan tugas dan tanggung jawabnya.

"Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi

mengerus _trust_ publik, ketidakpatuhan pajak bisa bisa meningkat naik," katanya.

Anggota DPR RI Komisi XI ini mengaku heran, disaat rasio perpajakan terhadap PDB atau _tax ratio_ mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir tetapi kasus yang mendera direktorat perpajakan seakan tak berhenti.

"Pemerintah harus fokus memperbaiki institusi pemungut pajak baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya, agar tax ratio makin tinggi sehingga porsi utang pada APBN bisa dikurangi," pungkasnya.

**Legislator PKS:
Kasus Keluarga
Pejabat Pajak,
Gerus Kepercayaan
Masyarakat pada
Institusinya**

Gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya kontraproduktif dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pajak itu kuat ikatannya dengan kepercayaan pembayar pajak, kasus ini berpotensi mengerus _trust_ publik, ketidakpatuhan pajak bisa bisa meningkat naik

H. HIDAYATULLAH, S.E
Anggota Komisi XI DPR RI



Fraksi PKS Apresiasi Pemerintah RI Bantu Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas respon cepat dalam mengirim bantuan dan misi kemanusiaan ke Turkiye dan Suriah yang dipimpin langsung oleh Duta Besar RI di Ankara Turkiye.

Jakarta (13/02) — Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengapresiasi Pemerintah RI yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi 7,8 skala richter yang menimpa wilayah Turkiye dan Suriah.

Jazuli menilai bantuan itu sangat diperlukan oleh Turkiye dan Suriah mengingat besarnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi. Bukan hanya bantuan makanan, perlengkapan, dan obat-obatan, pengerahan relawan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan oleh dua negara terdampak gempa dahsyat tersebut.

"Sebagai negara yang bersahabat baik, Pemerintah RI sewajarnya mengirim bantuan kemanusiaan. Pemerintah Turkiye juga beberapa kali mengirim bantuan saat terjadi bencana di tanah air seperti saat Tsunami Aceh, gempa Palu, dan terakhir gempa Cianjur," ungkap Anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas respon

cepat dalam mengirim bantuan dan misi kemanusiaan ke Turkiye dan Suriah yang dipimpin langsung oleh Duta Besar RI di Ankara Turkiye.

"Solidaritas kemanusiaan global adalah bagian dari amanat konstitusi RI. Apalagi di tengah bencana yang silih berganti menimpa dunia. Warga dunia yang tertimpa musibah bisa merasakan kehadiran

saudara-saudaranya di belahan dunia lain. Bahwa kita di Indonesia terut berduka dan peduli dengan nasib mereka," ungkap Jazuli.

Dengan demikian warga dunia bisa merasakan indahnya kebersamaan. "Sebaliknya, solidaritas kemanusiaan semestinya bisa menyadarkan negara-negara dunia agar menjauhi sikap permusuhan, pertikaian hingga perang," pungkas Jazuli.

"Solidaritas kemanusiaan global adalah bagian dari amanat konstitusi RI. Apalagi di tengah bencana yang silih berganti menimpa dunia. Warga dunia yang tertimpa musibah bisa merasakan kehadiran saudara-saudaranya di belahan dunia lain. Bahwa kita di Indonesia terut berduka dan peduli dengan nasib mereka,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Terima Press Room DPR RI, **Ketua FPKS Ajak Media Sebarkan Berita Baik dan Objektif**



Jakarta (13/02) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyambut silaturahmi Pengurus Koordinatorata Warta-wan Parlemen (KWP) di ruang pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Senin, (13/02).

Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menyebutkan bahwa wartawan dan media ini sebagai mitra perjuangan dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan publik, kepentingan umat, kepentingan rakyat termasuk juga kepentingan nasional Republik Indonesia.

"Kalau kita bicara nasionalisme Indonesia itu kita bukan bicara lagu-lagu kebangsaan atau hari-hari besar nasional. Kalau PKS menyorot nasionalisme itu, bagaimana eksistensi Indonesia itu menjadi sebuah negara yang mandiri, negara yang kekayaannya tidak boleh diobral untuk kepentingan orang luar, tetapi untuk bangsa dan rakyat sendiri," jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Di Era sekarang, kata Jazuli, sebuah negara tidak punya korelasi dan hubungan dengan negara luar itu mustahil. Tapi PKS berpandangan prinsip yang harus dimiliki saat harus berhubungan dengan negara-

negara lain adalah prinsip kesetaraan dan keadilan.

"Temen-temen media atau press room ini bagi kami merupakan mitra perjuangan dari Fraksi PKS di parlemen. Kami tahu di parlemen ini bukan hanya Fraksi PKS, bahwa ada delapan Fraksi lainnya. Kami punya harapan, walaupun Fraksi PKS ini oposisi yang berperan sebagai check and

balances Pemerintah, rekan-rekan media bisa menyuarakan sikap Fraksi PKS kepada masyarakat," urai Anggota DPR RI dari Dapil Banten II ini.

Selanjutnya, lanjut Jazuli, pihaknya menyampaikan rasa terimakasih atas pemberian ruang yang cukup bagi anggota Fraksi PKS untuk tampil menjadi pembicara dalam beberapa event atau program diskusi.

"Yang terakhir, kami memohon kepada rekan-rekan KWP untuk bersikap objektif, tak perlu melihat oposisi atau koalisi, selama berita tersebut baik untuk masyarakat dan publik maka sampaikan dan sebarkan seluas-luasnya," tutup Jazuli.

“
Temen-temen media atau press room ini bagi kami merupakan mitra perjuangan dari Fraksi PKS di parlemen. Kami tahu di parlemen ini bukan hanya Fraksi PKS, bahwa ada delapan Fraksi lainnya. Kami punya harapan, walaupun Fraksi PKS ini oposisi yang berperan sebagai check and balances Pemerintah, rekan-rekan media bisa menyuarakan sikap Fraksi PKS kepada masyarakat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Polda Kalsel Musnahkan
Puluhan Ribuan Kilogram Narkoba

Habib Aboe: Perang terhadap Narkoba Jangan Pernah Surut



Banjarmasin (20/02) — Anggota Komisi III DPR RI dari Faksi PKS, Aboebakar Alhabsy menghadiri langsung proses pemusnahan barang bukti narkotika puluhan ribu kilogram sabu dan extacy di Polda Kalimantan Selatan, Senin (20/02).

"Alhamdulillah, hari ini saya menyambut dengan gembira ada pemusnahan barang bukti narkoba di Polda Kalsel ini. Saya apresiasi hasil kerja Polda Kalsel pada periode Desember sampai Januari yang berhasil menangkap 79,315 kg sabu dan 11,792 butir extacy, barang bukti tersebut hari ini kita musnahkan. Perang melawan narkoba harus terus kita lakukan, kita tidak boleh menyerah dengan peredaran narkoba," ujar Aboe.

Menurut survey dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal setiap harinya diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Artinya, setiap tahun terdapat sekitar 180.000 orang yang meninggal akibat penyalahgunaan ini.

"Peningkatan penyalahgunaan narkoba pada masa ini berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk dengan berkurangnya interaksi sosial di dalam lingkungan sekitar maupun keluarga,

meningkatnya pengangguran dan juga hilangnya budaya yang memiliki nilai moral di masyarakat, banyaknya tindakan kriminalitas yang terjadi, dan berkurangnya produktivitas dalam bekerja,' jelas Sekjen DPP PKS ini.

Tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kata Habib Aboe, disebabkan oleh banyak faktor, yaitu wilayah Indonesia yang

terbuka sebagai sebuah negara kepulauan dan banyaknya sungai yang memudahkan peredaran narkotika sampai ke wilayah terpencil, faktor keluarga dan lingkungan, dan faktor individu tersebut.

"Saya minta Polda Kalsel terus bersemangat melawan peredaran narkoba. Karena kalau kita lihat data yang ada, Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna. Oleh karenanya, kita harus terus berikhtir agar generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak muda di Kalsel ini terbebas dari narkoba," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Peningkatan penyalahgunaan narkoba pada masa ini berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk dengan berkurangnya interaksi sosial di dalam lingkungan sekitar maupun keluarga, meningkatnya pengangguran dan juga hilangnya budaya yang memiliki nilai moral di masyarakat, banyaknya tindakan kriminalitas yang terjadi, dan berkurangnya produktivitas dalam bekerja

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI



Jelang Ramadan, Legislator PKS Minta Pemerintah Jaga Pasokan dan Kelangkaan Sembako

Jakarta (22/02) — Anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet meminta pemerintah menjaga pasokan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) menjelang datangnya bulan suci ramadhan.

Menurutnya, beberapa jenis bahan pokok masyarakat mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah seperti minyak goreng dan beras 5 kg di sejumlah toko retail.

"Saya melihat Pemerintah hanya bercuap-cuap terkait kenaikan harga sembako di pasaran namun belum memberi perhatian khusus kepada pasokan bahan pangan yang cukup. Padahal jika harga pangan naik itu adalah sinyal keterbatasan pasokan pangan," ungkap Slamet di Jakarta, Rabu (22/02).

Selain pasokan, kata Slamet, pemerintah juga harus terus menjaga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dari segi keterjangkauan harga serta ketersediaannya.

"Ungkapan tersebut bukan tanpa alasan mengingat rilis indeks keamanan pangan Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup tajam dan salah satu nilai yang paling mengalami penurunan tajam adalah aksesibilitas terhadap pangan," ujarnya.

Baru-baru ini Gubernur

Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa mengeluhkan mengenai ketersediaan beras di Jawa Timur padahal menurutnya provinsi yang ia pimpin tersebut surplus beras 3,1 juta ton namun beras mengalami kelangkaan di pasaran.

Senada dengan hal tersebut politisi senior PKS ini meminta pemerintah untuk mengambil langkah strategis menjaga pasokan pangan strategis sehingga memberikan rasa aman dan bahagia bagi masyarakat yang tengah menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan beberapa komoditas strategis mengalami kenaikan harga (perbandingan day to day) seperti cabai merah keriting 0,65 persen Rp. 300 rupiah, cabai rawit merah 1,39 persen Rp. 850, minyak goreng bermerek kelas 1 0,23 persen, gula pasir 0,32 persen.

"Saya melihat Pemerintah hanya bercuap-cuap terkait kenaikan harga sembako di pasaran namun belum memberi perhatian khusus kepada pasokan bahan pangan yang cukup. Padahal jika harga pangan naik itu adalah sinyal keterbatasan pasokan pangan,"

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI





Kunker ke Sultra, Andi Akmal Dorong Bulog Optimalkan Serapan pada Musim Panen Raya 2023



Kendari (21/02) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengharapkan target penyerapan bulog minimal bisa sebanyak 1,5 juta ton atau bahkan 2 juta ton sampai Juni 2023.

Hal ini disampaikan pada saat kunjungan kerja Komisi IV ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dimana rombongan Komisi IV DPR didampingi Direktur Jenderal Tanaman Pangan, saat melakukan kunjungan kerja ke Bulog Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin (20/02).

Akmal menerangkan, bahwa Seiring dengan musim panen raya padi awal 2023 yang berlangsung di banyak wilayah di Indonesia, Komisi IV DPR RI menegaskan produksi gabah dan beras dalam negeri saat ini melimpah ruah.

"Oleh karena itu, Bulog perlu menyerap beras dalam negeri dengan harga yang fleksibel agar serapannya dapat optimal," kata Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini terus mendorong Perum Bulog untuk menyerap gabah petani secara maksimal dengan harga yang fleksibel di tengah masa panen raya yang sedang berlangsung awal tahun ini.

Dihadapan dirjen tanaman pangan, Akmal menyampaikan dorongan ini sekaligus pada fungsi pengawasan saat reses

persidangan III tahun sidang 2022-2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara di Bulog Kota Kendari.

"Kenapa? karena kita tahu Bulog selama ini adalah pedagang, sehingga target penyerapan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah minimal 1,5 juta ton, syukur-syukur 2 juta ton sampai dengan bulan Juni ini karena musim panen sedang berlangsung di mana-mana. Produksi kita cukup melalui data BPS, yang merupakan data yang dijamin oleh negara," kata

pria kelahiran Bone ini.

Andi Akmal menguraikan Bulog mengutamakan pembelian dalam negeri sangat penting dan memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian dalam negeri. Pasalnya, memberikan keuntungan langsung kepada petani.

"Oleh karena kita terus meminta Bulog melakukan pembelian beras di dalam negeri dengan harga fleksibilitas. Ini harus di realisasi. Saya kira kuncinya di situ karena Bulog dituntut juga untuk melakukan operasi pasar. Bagaimana bisa operasi pasar kalau tidak punya stok. Dengan pembelian dalam negeri, maka petani pun diuntungkan," tegas Andi Akmal Pasluddin

kita terus meminta Bulog melakukan pembelian beras di dalam negeri dengan harga fleksibilitas. Ini harus di realisasi. Saya kira kuncinya di situ karena Bulog dituntut juga untuk melakukan operasi pasar. Bagaimana bisa operasi pasar kalau tidak punya stok. Dengan pembelian dalam negeri, maka petani pun diuntungkan,"

**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI



KOMISI PEMILUHA
REPUBLIK INDONESIA

1

Tahun
Menuju
Pemilu

14 Februari 2023 - 14 Februari 2024

Aleg PKS: Bermasalah Sejak Awal, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sulit Beroperasi Juli 2023

Jakarta (14/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana Pemerintah yang menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023 ini.

Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, sejak awal proyek dimulai hingga saat ini banyak sekali masalah yang menyertai, mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenangkan oleh China.

"Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek," ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.

Kecelakaan terakhir, imbuhnya, yang terjadi adalah ketika tabrakan antara Kereta Pegawai dan Kereta Teknis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (18/12/2022) yang menewaskan dua pekerja proyek asal China.

"Progres dari proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84%, namun apabila proyek ini

selesai sesuai dengan rencana pada bulan Juni 2023 maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023," terang Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Beberapa pihak menganggap, kata SJP, waktu ujicoba yang hanya sekitar dua bulan antara bulan Juni 2023 hingga Juli 2023 terlalu singkat. Sebab Jepang yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian, biasanya membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.

"Banyak sekali data penting yang dikumpulkan selama uji coba, dimana kereta harus diuji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan, yang penyesuaian-nya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi," pungkasnya.

SJP meminta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut.

"Jangan sampai terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko, termasuk kecelakaan. Kita juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat, agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman," tegas SJP.

"Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun,

tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat. Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?," tanya SJP prihatin.



"Jangan sampai terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko, termasuk kecelakaan. Kita juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat, agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman,"

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI



Aleg PKS Minta Kementerian PUPR Tambah Masa Kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan

Jakarta (17/02) --- Menerima aspirasi dari para Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) di dapilnya pada Senin (13/02/2023).

Anggota Komisi V DPR RI asal Jabar XI berjanji akan menyampaikannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada masukan dari TFL di Dapil kami, khususnya yang melaksanakan tugas kegiatan BSPS PUPR. Mereka mengeluhkan masa kontrak yang semakin pendek pada tahun ini, hanya 4 bulan dengan target pekerjaan yang sama. Padahal tahun-tahun sebelumnya mereka diberikan waktu selama 8 bulan hingga pelaporan akhir," tutur Toriq Hidayat.

Menurut Aleg Pusat Fraksi PKS dengan jumlah penerima BSPS yang didampingi oleh TFL dan tugas dilapangan mulai perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pendampingan dalam membangun rumah yang layak huni hingga laporan akhir, idealnya kontrak TFL minimal 6 bulan. Belum lagi jika ada kendala-kendala dilapangan yang sulit diprediksi.

"Harapannya dengan durasi masa kontrak yang cukup, para TFL mampu bekerja dengan baik. Karena mereka ini

ujung tombak dalam melayani masyarakat kurang mampu agar bisa memiliki rumah berkualitas layak huni. Apalagi salah satu fokus penanganan rumah swadaya yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrem (PKE)," ujar Toriq.

Toriq menambahkan diantara indikator keberhasilan Program BSPS adalah keswadayaan masyarakat yang

meliputi kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni, keaktifan dalam proses kegiatan pembangunan, serta nilai atau besaran swadaya masyarakat sebagai penerima bantuan.

"Para TFL ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam seluruh proses di lapangan untuk mencapai indikator keberhasilan diatas. Karenanya saya minta agar Kementerian PUPR dapat menambah atau mengembalikan masa kontrak mereka pada kegiatan BSPS tahun anggaran berikutnya," tutup Toriq.

"Harapannya dengan durasi masa kontrak yang cukup, para TFL mampu bekerja dengan baik. Karena mereka ini ujung tombak dalam melayani masyarakat kurang mampu agar bisa memiliki rumah berkualitas layak huni. Apalagi salah satu fokus penanganan rumah swadaya yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrem (PKE),"

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

Komisi V FPKS Desak Ditjen Perkeretaapian Evaluasi SPM Stasiun Manggarai

Surabaya (21/02) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian melakukan evaluasi menyeluruh terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Stasiun Manggarai menyusul banyaknya keluhan pengguna KRL yang melakukan transit di stasiun ini.

“Sejak diberlakukannya switch over 5 (S05) pada Mei tahun lalu, stasiun Manggarai selalu dikeluhkan pengguna KRL. Tidak hanya mengeluhkan soal kepadatan stasiun yang sudah tidak manusiawi di jam-jam sibuk, pengguna KRL juga mengeluhkan soal keamanan dan fasilitas stasiun yang tidak berfungsi dengan baik. Seperti escalator dan lift yang sering mati. Ini seharusnya menjadi

perhatian Dirjen Perkeretaapian. Sebagai regulator, sudah seharusnya Dirjen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan SPM di stasiun Manggarai. Jangan korbankan pengguna KRL hanya untuk memenuhi target jumlah penumpang yang transit,” kata Sigit.

Sigit mengatakan pasal 137 UU Perkeretaapian

menyebutkan pelayanan angkutan orang dengan kereta api harus memenuhi standar pelayanan minimum mulai dari pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, hingga sampai di stasiun tujuan.

“Aturan mengenai pemenuhan SPM angkutan orang dengan kereta api juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api,” ungkapnya.

Dalam aturan tersebut, imbuh Sigit, dijelaskan secara detail mengenai SPM yang harus dipenuhi stasiun dan KRL yang mengangkut penumpang, seperti adanya lift dan escalator untuk stasiun yang jumlah lantainya lebih dari satu, tersedia tempat duduk untuk penumpang berkebutuhan khusus, petugas keamanan yang memadai dan sebagainya.

Namun dalam implementasinya, kata Sigit, masih banyak keluhan dari konsumen mengenai SPM KRL. Hal itu, kata Sigit, membuktikan SPM yang disyaratkan dalam UU Perkeretaapian dan Permenhub No.63/2019 belum terpenuhi.

“Kalau SPM stasiun Manggarai sudah terpenuhi, tidak mungkin pengguna mengeluh terus. Jangankan untuk penyandang disabilitas, untuk penumpang yang sehat saja stasiun Manggarai

dianggap mengerikan. Karena kepadatan stasiun Manggarai yang sudah tidak manusiawi, memicu aksi criminal seperti pencopetan. Karena sudah sangat berdesak-desakan, otomatis memudahkan pencopet beraksi. Sampai kapan mau mengorbankan pengguna KRL hanya untuk mengejar jumlah penumpang yang transit di Manggarai. Jika memang tidak bisa memenuhi SPM, ya sebaiknya jangan dipaksakan. Kembalikan saja rute KRL seperti sebelumnya dan tidak usah memaksakan transit di Manggarai. Kasihan penumpang. Jangankan memenuhi SPM kenyamanan,

keamanan saja sudah terabaikan distasiun ini,” kata Sigit, Anggota DPR RI dari Dapi 1 Jawa Timur (Jatim) tersebut.

Seperti diketahui, sejak diberlakukannya S05 pada Mei tahun lalu, sebagian besar penumpang KRL sudah mengeluhkan kondisi stasiun Manggarai yang sudah overload pada jam-jam sibuk. Tak hanya kepadatan yang sudah melampaui daya tampung, keterlambatan KRL, fasilitas stasiun yang tidak berfungsi dan keamanan juga dikeluhkan pengguna KRL. Bahkan, keluhan pengguna KRL terhadap stasiun Manggarai kerap menjadi trending topic di twitter.

“Aturan mengenai pemenuhan SPM angkutan orang dengan kereta api juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api,”

**Ir. H. SIGIT
SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI



Aleg PKS Tegaskan Grup Lippo Tak Bisa Lepas Tanggung Jawab Persoalan Meikarta

Surabaya (21/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., mendesak Kelompok Usaha Lippo tidak lepas tanggung jawab begitu saja dalam kisruh Apartemen Meikarta, Cikarang, Jawa Barat yang merugikan konsumen.

Menurut Amin, sejak awal Megaprojek Meikarta merupakan proyek yang diusung dua perusahaan properti milik Grup Lippo, yakni PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang memiliki proyek tersebut sepenuhnya merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang. Sementara itu PT Lippo Karawaci sendiri menguasai saham PT Lippo Cikarang hingga 54%.

“Saya prihatin dengan penolakan Lippo untuk bertanggung jawab atas permasalahan Meikarta yang

digugat konsumen, dengan alasan mereka tidak lagi menjadi pemilik saham MSU. Kok kesannya lari dari tanggung jawab,” tegas Amin.

Menurut Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur IV itu, dilihat dari kronologi permasalahan yang membelit Meikarta sejak awal, wajar jika Masyarakat mencurigai ada aksi akrobatik dalam proses penjualan saham MSU oleh PT Lippo Cikarang ke Hasdeen Holding, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura.

Dari sisi waktu, pengalihan saham kepemilikan MSU terjadi setelah lebih dari setahun

Lippo, dalam hal ini MSU, mengalami berbagai persoalan serius mulai dari perizinan bermasalah hingga digugat oleh sejumlah vendor maupun kontraktor pelaksana proyek. Ditengah gugatan bertubi-tubi tersebut, secara tiba-tiba Lippo Cikarang melepas sahamnya di MSU, sehingga wajar jika banyak pihak mencurigai langkah tersebut sebagai upaya lepas tanggung jawab dari Lippo.

“Ini kan mencurigakan. Ditengah berbagai tuntutan agar bertanggung jawab malah mereka melapas di perusahaan milik mereka,” kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab profesional, seharusnya pemilik Lippo melakukan dua hal. Pertama, Lippo harus bisa membuktikan bahwa Hasdeen Holding yang kini menguasai saham mayoritas MSU adalah benar-benar bukan perusahaan cangkang milik Lippo.

“Saya juga minta pemerintah melalui lembaga terkait, demi melindungi konsumen yang dirugikan, harus mampu membuktikan apakah, aksi pelepasan saham ini tidak berkaitan dengan upaya lepas tanggung jawab Grup Lippo,” desaknya.

Kedua, terlepas dari penjualan saham milik Lippo di MSU, Grup Lippo harus tetap bertanggung jawab terhadap konsumen, baik secara bisnis maupun moral. Karena semua

bentuk promosi atau iklan maupun transaksi pembelian unit apartemen Meikarta sudah terjadi sejak MSU masih dimiliki oleh Lippo.

“Saya khawatir masyarakat menilai Lippo telah melakukan kebohongan publik dalam penjualan unit apartemen Meikarta dan kemudian lari dari tanggung jawab,” kata Amin.

Selain itu, jika terbukti Lippo lari dari tanggung jawab dari persoalan Meikarta, sudah seharusnya pemerintah memberikan sanksi tegas

bahkan jika perlu berupa pencabutan izin usaha Lippo di industri properti. Hal itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi perkembangan industri properti di tanah air.

“DPR dalam kasus ini harus ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dalam konteks memastikan terlindungi dan terkawalnya hak-hak konsumen Meikarta yang dirugikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.



“Saya juga minta pemerintah melalui lembaga terkait, demi melindungi konsumen yang dirugikan, harus mampu membuktikan apakah, aksi pelepasan saham ini tidak berkaitan dengan upaya lepas tanggung jawab Grup Lippo,”

AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI



Soal Larangan Jilbab
Maskapai Plat Merah,

Aleg PKS Dorong Komisi VI Panggil Dirutnya

Jakarta (13/02) — Kabar adanya maskapai penerbangan yang melarang pramugarinya berhijab saat bertugas mendapat perhatian khusus dari Anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina.

Yang semakin menjadi perhatian adalah, imbuh Nevi, kasus larangan jilbab ini bersumber dari maskapai penerbangan plat Merah, milik negara.

Politisi PKS ini mengatakan, larangan penggunaan jilbab telah mengekang kebebasan. Padahal, lanjutnya, seragam awak kabin berjilbab tidak mengganggu keselamatan penerbangan sejauh desainnya benar, mudah dilepas bila dalam kondisi darurat.

“Kami di Komisi VI akan memanggil Dirut Garuda untuk menjelaskan persoalan ini. Siapapun tidak berhak

melarang penggunaan jilbab, termasuk BUMN Garuda Indonesia. Memakai Jilbab adalah Hak Asasi Manusia, setiap orang punya hak untuk menjalankan keyakinannya dalam beragama,” tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan, Garuda Indonesia sebagai BUMN penerbangan kebanggaan Indonesia sudah seharusnya memfasilitasi awak kabin yang ingin menggunakan jilbab. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar sedunia, alangkah mirisnya jika BUMN penerbangan yang dimiliki terkesan mengekang para muslimah untuk berkarir

dengan tetap menjalankan prinsip agamanya menggunakan jilbab.

“Jika faktor keamanan dan kenyamanan dijadikan alasan untuk tidak memperbolehkan pramugari berjilbab, tentunya maskapai semacam Saudi Arabian Airlines, Royal Brunei Airline, atau bahkan Sriwijaya Air pasti pramugarinya juga tidak akan berjilbab. Berkaca dari penerbangan internasional yang pramugarinya mengenakan jilbab, maskapai penerbangan itu baik-baik saja di mata konsumen seluruh dunia, bahkan mendapat apresiasi tentang pelayanan baiknnya,” tutur Nevi.

Nevi menegaskan, Garuda Indonesia sudah seharusnya memfasilitasi penggunaan jilbab bagi awak kabin, melalui peraturan yang diberlakukan di dalam perusahaan. Garuda Indonesia harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

“Penggunaan jilbab merupakan salah satu keyakinan bagi muslimah yang dijamin kemerdekaannya oleh negara, hal itu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang dinyatakan dengan tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” tutup Nevi Zuairina.



Jika faktor keamanan dan kenyamanan dijadikan alasan untuk tidak memperbolehkan pramugari berjilbab, tentunya maskapai semacam Saudi Arabian Airlines, Royal Brunei Airline, atau bahkan Sriwijaya Air pasti pramugarinya juga tidak akan berjilbab.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Live
Interactive

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



Saksikan
Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Politisi PKS Tegas Minta Pemerintah Stop Hilirisasi Mineral

Jakarta (22/02) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral karena berpotensi merugikan keuangan negara.

Mulyanto menilai program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memanjakan investor sehingga pendapatan negara dari sektor ini sangat kecil.

Penerimaan negara dari hilirisasi ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki risiko kerusakan lingkungan, gejala sosial di masyarakat termasuk penanganan gugatan di WTO.

"Dengan segala pertimbangan sebaiknya pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral, baik nikel, tembaga, timah, bauksit dan lainnya. Saatnya kita mengubah konsep pengelolaan SDA kita dari hilirisasi menjadi

industrialisasi," ungkapnya.

Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah Jokowi sekarang ini, tegas Mulyanto, terlalu boros dengan berbagai insentif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sudah begitu hasilnya hanya sekedar produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

Mulyanto menyebut tingginya nilai ekspor mineral tidak sebanding dengan besarnya penerimaan negara. Apalagi diketahui bahwa dana hasil ekspor (DHE) tersebut ternyata tidak masuk ke Indonesia tetapi malah diparkir di luar negeri. Akibatnya dana tersebut tidak menjadi devisa nasional.

"Ini kan luar biasa.

Terkesan kita hanya menjadi subordinasi industrialisasi di China, dimana kita mengeksport barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah lalu di sana diolah dan dikembangkan dalam mesin industri mereka menjadi barang yang bernilai tambah tinggi. Ujung-ujungnya mereka yang sejahtera, kita yang menanggung musibah," kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan insentif fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah dalam program hilirisasi ini sangat boros. Pertama adalah insentif harga bijih nikel domestik yang dijual setengah dari harga internasional, kemudian pemerintah membebaskan pajak ekspor, pajak badan, pajak pertambahan nilai, memberi izin penggunaan mesin produksi yang tidak teruji serta membuka pintu bagi TKA tanpa keterampilan dengan gaji mahal.

Sementara produk yang dihasilkan hanya nickel pig iron (NPI) serta Ferro Nikel dengan kadar nikel yang sangat rendah sekitar 4-10 persen dengan harga murah.

Karena itu Mulyanto menegaskan pemerintah harus menghentikan hilirisasi mineral yang merugikan negara ini.

"Sekarang sudah saatnya kita menggeser fokus dan visi pengelolaan SDA hilirisasi menjadi industrialisasi. Tujuannya agar rakyat benar-

benar dapat menikmati nilai tambah SDA serta berbagai multiplier effect lainnya," kata Mulyanto.

"Jangan sampai SDA kita habis terkuras hanya sekedar untuk mendukung program

industrialisasi di negara lain. Sementara rakyat kita tetap miskin dan terbelakang, terperangkap kutukan SDA yakni negara kaya SDA namun rakyatnya miskin dan terbelakang," imbuhnya.



"Jangan sampai SDA kita habis terkuras hanya sekedar untuk mendukung program industrialisasi di negara lain. Sementara rakyat kita tetap miskin dan terbelakang, terperangkap kutukan SDA yakni negara kaya SDA namun rakyatnya miskin dan terbelakang," imbuhnya.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI



RDP dengan Ditjen Migas KESDM, Aleg PKS Dorong Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta (15/02) — Anggota Legislatif Fraksi PKS Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, mendorong kepada Kementerian ESDM dan Mitra terkait untuk segera memprioritaskan Program Pengembangan Jaringan Gas terutama dalam Infrastruktur pembuatan LPG.

Selama ini, gas LPG yang digunakan oleh masyarakat Indonesia mayoritas merupakan barang impor bukan produksi sendiri karena tingkat produksi yang bisa dihasilkan oleh Indonesia itu jumlahnya terbatas. Tingkat ketergantungan Indonesia untuk impor gas LPG semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kuota LPG subsidi Indonesia pertahunnya bisa mencapai 8 Mton, sesuai target yang ingin dihasilkan oleh Indonesia menurut laporan yang diberikan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM pada Rapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM pada

Selasa (14/02).

Dalam kesempatan RDP tersebut, Politisi Perempuan PKS asal Jawa Barat yang juga akrab disapa teh Diah itu menyampaikan agar Kementerian ESDM dalam hal ini Ditjen Migas memprioritaskan program pengembangan Jaringan Gas untuk pembuatan LPG.

"Saya kembali ingin menegaskan mengenai pengembangan jaringan gas, karena LPG yang kita konsumsi sekarang sebagian besar merupakan impor. Karena itu pengembangan jaringan gas termasuk ketersediaan infrastrukturnya harus menjadi

program-program yang di prioritaskan karena mau sampai kapan kita tergantung pada Impor LPG. Harus ada langkah-langkah serius dan konkrit untuk mengembangkan masalah jaringan gas ini," ujar Diah.

Diketahui hingga 2022 target 1 Juta sambungan Jargas pemerintah masih belum mencapai target, sehingga diperlukan usaha yang optimal untuk menuju target tersebut.

Diakhir rapat, Ditjen Migas KESDM senada dengan DPR, menyampaikan harapannya bahwasanya infrastruktur Migas untuk gas LPG bisa selesai seluruhnya pada tahun 2024 mendatang.



"Saya kembali ingin menegaskan mengenai pengembangan jaringan gas, karena LPG yang kita konsumsi sekarang sebagian besar merupakan impor. Karena itu pengembangan jaringan gas termasuk ketersediaan infrastrukturnya harus menjadi program-program yang di prioritaskan karena mau sampai kapan kita tergantung pada Impor LPG. Harus ada langkah-langkah serius dan konkrit untuk mengembangkan masalah jaringan gas ini,"

Dipl.Ing. Hj. **DAH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI



Bongkar Komponen Penyebab Biaya Haji Tinggi, Bukhori Upayakan Tekan Bipih hingga Rp47 Juta

Jakarta (11/02) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf membeberkan empat komponen utama penyebab tingginya biaya penyelenggaraan haji 2023. Komponen tersebut di antaranya penerbangan, akomodasi, katering, dan masyair.

Untuk itu, Bukhori menawarkan empat strategi guna menurunkan biaya haji akibat pembengkakan yang dipengaruhi oleh keempat komponen tersebut.

"Secara garis besar ada empat strategi yang saya tawarkan, pertama menurunkan harga-harga yang tidak wajar. Kedua, menghilangkan regulasi yang tidak berdasar. Ketiga, menghapus kebijakan turunan yang memberatkan dan mengada-ada serta yang keempat adalah memangkas durasi waktu dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari," jelas Bukhori di Jakarta, Jumat (10/02/2023).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menuturkan, salah satu harga tidak wajar yang perlu diturunkan adalah harga masyair.

Menurutnya, penetapan harga masyair yang dilakukan oleh Syarikat terlalu tinggi dan tidak berdasar. Untuk itu, Bukhori mendesak pemerintah melakukan negosiasi secara maksimal guna menurunkan

harga masyair hingga di angka maksimal SAR2.000.

"Masyair yang selama ini dikelola oleh Muasasah, sekarang berubah menjadi syarikat, sudah berpuluh tahun kita manjakan. Selama ini maksimal per orang dikenakan SAR1.000, kemudian pada tahun 2020 dinaikkan menjadi SAR1.500, meskipun batal karena pandemi. Kemudian tiba-tiba, pada tahun 2022 mengalami penetapan baru

hingga mencapai SAR5.600, tetapi sangat disayangkan pemerintah kita kurang maksimal negosiasinya, sehingga akhirnya kita ditindas. Semestinya kita bisa dapat per orang SAR1.000-2.000, cukup itu," tegas Bukhori.

Kedua, Anggota Komisi Agama DPR ini menyoroti komponen perhotelan dan bus shalawat. Bukhori mengaku heran dengan kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama.

"Ada hotel yang diambil oleh Kemenag dan ditetapkan per orangnya dikenakan SAR5.000. Padahal 500 meter dari sana, ada juga hotel dengan kapasitas yang sama, siap menyediakan shuttle bus atau (difungsikan sebagaimana) bus shalawat, dan harganya

BERIKUTNYA >>>

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menuturkan, salah satu harga tidak wajar yang perlu diturunkan adalah harga masyair. Menurutnya, penetapan harga masyair yang dilakukan oleh Syarikat terlalu tinggi dan tidak berdasar. Untuk itu, Bukhori mendesak pemerintah melakukan negosiasi secara maksimal guna menurunkan harga masyair hingga di angka maksimal SAR2.000.



Bongkar Komponen Penyebab Biaya Haji Tinggi ...

« SEBELUMNYA

cuma SAR3.000-3.500," ungkapnya.

Terkait dengan bus shalawat yang dianggarkan hingga mencapai Rp129 miliar, Bukhori menilai anggaran tersebut bisa dioptimalkan dengan cara dibebankan kepada pihak hotel.

"Kenapa kemudian tidak diambil peluang itu? Padahal banyak hotel yang siap menyediakan shuttle bus sehingga itu bisa memangkas biaya (bus shalawat). Namun yang diambil justru yang lebih mahal. Contoh misalnya yang ada di Misfalah itu setahun saya hotel yang paling bagus satu, Conoco. Sedangkan yang lainnya hotel-hotel kecil tapi mahal, kenapa? Karena image-nya dekat dengan Masjidil Haram. Padahal secara durasi tempuh relatif sama. Mereka 3 kilometer jalan kaki, 20-25 menit. Sementara di hotel lain yang menyediakan shuttle bus, juga 20 menit dan aksesnya mudah. Karena itu saya merekomendasikan agar tidak

ada pembatasan zonasi," urainya.

Selanjutnya, solusi yang ditawarkan legislator dapil Jawa Tengah 1 ini adalah menyingkat durasi haji dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari. Bukhori mengatakan kuncinya terletak pada skema penerbangan.

"Saat di Jeddah, kami ketemu dengan teman-teman. Mereka bilang, salah satu maskapai penerbangan swasta Indonesia saja dalam sehari bisa menurunkan penumpang sampai 17 kali. Lantas kenapa Plat Merah (Garuda Indonesia) enggak bisa? Padahal menurut perhitungan kami semisal pesawatnya itu berisi 400 penumpang, dengan 15 kali menurunkan saja itu sudah lebih dari 260.000. Padahal jemaah kita hanya 221.000 sehingga kami nilai sangat memungkinkan," terangnya.

Lebih lanjut, Anggota Badan Legislatif ini juga menyortir komponen konsumsi yang seharusnya bisa dioptimalkan. Dia mengusulkan agar sebagian kebutuhan konsumsi diberikan dalam

bentuk uang tunai kepada jemaah agar mereka lebih leluasa.

"Ide agar sebagian kebutuhan konsumsi diberikan dalam bentuk uang tunai perlu dipertimbangkan serius. Ini untuk menghindari makanan catering yang terbuang mubazir sekaligus untuk memberikan multiplier effect. Mereka bisa diberikan Rp8 juta per jemaah misalnya," ujarnya.

Masih terkait konsumsi, selama melakukan survei di Arab Saudi, Bukhori mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah hotel bisa menawarkan catering dengan harga yang lebih terjangkau, SAR 11-12 per porsi, bahkan ada yang menawarkan dengan konsep buffet, SAR 35 untuk 3 kali makan, ungkapnya.

Berdasarkan pola-pola tersebut, Bukhori optimis bisa menurunkan BPIH hingga Rp82 juta.

"Lebih jauh jika BPIH itu Rp82 juta, konsekuensinya bipih cukup Rp47 juta. Rincinya, Rp25 juta itu setoran awal, dari virtual account 5 juta, dan jemaah cukup menambah Rp17 juta sementara Rp35 juta dibayar oleh dana efisiensi," pungkasnya



“Secara garis besar ada empat strategi yang saya tawarkan, pertama menurunkan harga-harga yang tidak wajar. Kedua, menghilangkan regulasi yang tidak berdasar. Ketiga, menghapus kebijakan turunan yang memberatkan dan mengada-ada serta yang keempat adalah memangkas durasi waktu dari 40 hari menjadi 35 sampai 30 hari,”

H. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



Apresiasi Biaya Haji Bisa Turun,
HNW: Mestinya Bisa Turun Lagi Hingga Rp 47 Juta

Jakarta (17/02) --- Anggota DPR-RI Komisi VIII yang juga Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan biaya haji (bipih) tahun 2023 yang ditetapkan, memang turun dari yang semula diusulkan oleh Kemenag yaitu rp 69,9 juta, tapi turunnya masih berada diangka Rp 49,8 juta atau nyaris di angka psikologis Rp 50 juta.

HNW sapaan akrabnya menjelaskan, bila merujuk pada penjelasan Kemenag terkait peruntukan biaya haji, dan fakta-fakta di lapangan, mestinya biaya haji masih bisa turun lagi ke kisaran angka Rp 47 juta.

"Saya tentu mengapresiasi Kemenag yang mau mendengarkan kritik dan masukan dari Anggota DPR Komisi VIII serta keberatan masyarakat luas soal kenaikan awal biaya haji di angka Rp 69,9 juta. Apresiasi juga diberikan kepada Panja Haji Komisi VIII DPR-RI yang telah mengkritisi, mengoreksi, melakukan kunjungan lapangan, dan mengawal soal kemahalan BPIH dan Bipih ini sehingga dapat menurunkan biaya haji tahun 2023.

"Namun angka akhir yang disodorkan oleh Kemenag yakni bipih Rp 49,8 juta per jamaah dengan peruntukan untuk tiga komponen yaitu ; penerbangan

Rp 32,743,992, living cost Rp 3,030,000, dan layanan Masyair sebesar Rp 14,038,708, masih tidak efisien dan mestinya bisa diturunkan lagi hingga mendekati Rp 47 juta, dan karena itulah FPKS DPRRI masih menolak ketentuan harga dari Kemenag yang Rp 49,8 juta tersebut," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/02/2023).

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menambahkan, pengurangan usulan biaya penyelenggaraan haji (BPIH) dari Rp 98,8 juta menjadi Rp 90,05 juta baru memangkas biaya layanan haji di Saudi dan living cost jamaah.

Padaahal, ada beberapa komponen lain yang masih mungkin dilakukan efisiensi, seperti biaya penerbangan, penginapan, transportasi darat di Saudi, hingga konsumsi.

Misalkan biaya penerbangan seharusnya bisa berpacu pada angka inflasi 5,5% saja, sehingga bisa di angka Rp 30,9 juta per jamaah. Atau kalau mengacu pada harga ticket normal Jakarta-Jeddah PP untuk jemaah Umrah, jelas bisa lebih diturunkan lagi.

"Itu pun kesesuaian dengan UU Keuangan Haji bahwa pengelolaan keuangan

BERIKUTNYA >>>

Akomodasi di makkah selayaknya bisa turun lagi setidaknya 200 SAR per jamaah, anggaran bus shalawat 146 SAR mestinya bisa dihapuskan dengan mencari pemondokan yang menyediakan layanan tersebut, dan makanan bisa turun lagi sekitar 2 SAR per jamaah atau 88 SAR untuk 44 kali makan.

Apresiasi Biaya Haji Bisa Turun...

« SEBELUMNYA

Haji harus berdasarkan syariat dalam konteks biaya penerbangan penting dikritisi, karena dengan angka itu, sejatinya calon jamaah haji diharuskan membayar dengan harga penuh pesawat kosong ketika pulang mengantar calon jamaah haji, maupun ketika pesawat kosong datang menjemput mereka pulang ke Indonesia," sambungnya.

Lalu akomodasi di Makkah selayaknya bisa turun lagi setidaknya 200 SAR per jamaah, anggaran bus shalawat 146 SAR mestinya bisa dihapuskan dengan mencari

pemondokan yang menyediakan layanan tersebut, dan makanan bisa turun lagi sekitar 2 SAR per jamaah atau 88 SAR untuk 44 kali makan.

Selain itu biaya pelayanan haji di Armuzna (Masyair) juga patut diturunkan lagi setidaknya ke angka 4000 SAR, mengingat adanya penghapusan pajak oleh pihak Saudi, dan fakta tidak adanya peningkatan layanan yang signifikan bila dibandingkan dengan haji pada tahun 2019 yang biaya masyaairnya hanya 1500 SAR.

"Tentunya jika biaya seluruh komponen tersebut bisa diperjuangkan oleh Kemenag menjadi lebih efisien,

BIPIH tahun 2023 bisa berada di kisaran angka Rp 85 juta, sehingga bipih atau beban yang dibayar langsung oleh setiap calon jamaah bisa turun ke sekitar Rp 46,7 juta," lanjutnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menjelaskan, dengan skenario demikian, maka jamaah waiting list tahun 2023 hanya dikenakan pembayaran pelunasan sebesar Rp 20,44 juta, lantaran sudah ada saldo setoran awal Rp 25 juta dan saldo virtual account sebesar Rp 1,3 juta. Adapun jamaah lunas tunda tetap dalam skenario tidak lagi perlu membayar tambahan pelunasan.

Kebutuhan nilai manfaat dari skenario tersebut adalah Rp 8,3 Triliun, bisa diambil dari saldo nilai manfaat berjalan yang bisa digunakan tahun 2023 sebesar Rp 7,1 Triliun dan akumulasi saldo nilai manfaat sebesar Rp 1,2 Triliun.

Keberlangsungan keuangan haji tetap terjaga karena akumulasi saldo nilai manfaat setelah digunakan untuk keperluan haji 2023 masih di level Rp 14 Triliun.

"Jika biaya yang ditanggung jamaah bisa semakin turun ke angka Rp 20 juta, maka tentu hal tersebut akan meringankan mereka untuk menunaikan haji dan semakin syukur dan semangat mendoakan kebaikan untuk negeri ini," ujarnya.

Meskipun berbagai usulan tersebut belum mampu

diupayakan oleh Kementerian Agama tahun ini, dirinya mengingatkan Kemenag dan BPKH untuk memastikan persiapan penyelenggaraan haji tahun-tahun ke depan agar lebih efektif, efisien dan sesuai syariah sebagaimana ketentuan UU Keuangan Haji.

Jangan sampai, imbuhnya, ada biaya-biaya yang dilambungkan sehingga berpotensi menjadi temuan KPK, serta perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai aturan syariah yang menjadi ketentuan dalam UU pengelolaan keuangan haji.

"Kemenag harusnya bisa menyajikan perencanaan pembiayaan haji yang efisien, dan lebih awal dalam memaksimalkan lobi harga

untuk biaya pelayanan, akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Agar masa tinggal jamaah haji Indonesia di Saudi hanya 30 hari, untuk itu agar ada tambahan bandara di Jeddah, Thaif, Yanbu maupun Qasim yang memungkinkan pesawat-pesawat pengangkut jamaah Haji dari Indonesia bisa leluasa take off dan landing. Dan agar BPKH juga harus lebih pintar dan sukses dalam mengelola keuangan haji agar nilai manfaatnya lebih banyak lagi untuk masalah jamaah, sehingga mereka tetap dalam kategori 'istitha'ah' untuk dapat memenuhi rukun Islam; melaksanakan ibadah Haji," pungkasnya.

"Kemenag harusnya bisa menyajikan perencanaan pembiayaan haji yang efisien, dan lebih awal dalam memaksimalkan lobi harga untuk biaya pelayanan, akomodasi dan transportasi di Arab Saudi. Agar masa tinggal jamaah haji Indonesia di Saudi hanya 30 hari, untuk itu agar ada tambahan bandara di Jeddah, Thaif, Yanbu maupun Qasim yang memungkinkan pesawat-pesawat pengangkut jamaah Haji dari Indonesia bisa leluasa take off dan landing

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI



PKS Tolak Kebijakan Yang Menyengsarakan Rakyat

Mei 2020



Meminta Pemerintah batalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Kelas 1: Rp 80.000 → **Rp 150.000**
Kelas 2: Rp 51.000 → **Rp 100.000**
Kelas 3: Rp 25.500 → **Rp 35.000**

September 2020



Tolak kenaikan bea meterai menjadi **Rp10.000**

Februari 2021



Tolak PMN untuk Jiwaseraya via IFG Life **20 Triliun**

April 2022



Tolak kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi **11%** dan **12%**

Juli 2022



Tolak PMN Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Tolak kenaikan LPG non subsidi



September 2022

Tolak kenaikan harga BBM bersubsidi

Pertalite Rp 7.650/liter → **Rp 10.000/liter**
Solar Rp 5.150/liter → **Rp 6.800/liter**

Januari 2023

Tolak impor **500.000 ton** beras saat produksi beras petani lokal surplus



Tolak rencana kenaikan tarif jalan tol



Februari 2023

Tolak kenaikan biaya haji 2023
Bipih 2022: **39,8 juta rupiah**
Bipih 2023: **49,8 juta rupiah**



Badai PHK 2023 Mengintai, Aleg PKS: Akibat Perppu Cipta Kerja yang Diterbitkan Pemerintah

Menurut Netty, anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh sehingga badai PHK dapat diminimalkan," ungkap anggota DPR RI daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon dan Indramayu tersebut.

Jakarta (20/02) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani mengingatkan Pemerintah akan potensi terjadinya badai PHK pada tahun 2023.

Menurut Netty, jika tak diantisipasi, maka hal tersebut akan menjadi ancaman yang serius.

"Harus ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK. Indikasinya sudah terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya," kata Netty dalam

keterangan medianya, Senin, (20/02).

Menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika dan Eropa ditengarai Netty sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK. Berdasarkan info asosiasi perusahaan tekstil dan sepatu, permintaan ekspor tekstil turun 30 persen dan industri sepatu atau alas kaki turun 50 persen.

Oleh sebab itu, kata Netty, Pemerintah perlu mencari alternatif tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri.

"Optimalkan APBN dan APBD untuk menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan," tegasnya.

Menurut Netty, anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh sehingga badai PHK dapat diminimalkan," ungkap anggota DPR RI daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon dan Indramayu tersebut.

"Pemerintah harus memaksimalkan penggunaan produk UMKM untuk kebutuhan dalam negeri sehingga memacu meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja," kata Netty.

Pada sisi lain, Ketua DPP PKS Bidang Kesos itu juga memint

a Kemnaker untuk mengawal setiap proses PHK yang terjadi di perusahaan.

"Pastikan para pekerja mendapatkan haknya sesuai peraturan. Bantu dan dampingi mereka agar segera mendapatkan hak-haknya termasuk pencairan JKP dan JHT," katanya.

Terakhir, Netty juga menyinggung soal Perppu Cipta Kerja yang dinilai semakin memudahkan terjadinya PHK.

Menurut Netty, Aturan PHK di Perppu Ciptaker menjadi lebih mudah dibandingkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Dalam Perppu ini pengusaha tidak perlu lagi mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau MA sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 151 ayat 3 UU Ketenagakerjaan," kata

Netty.

"UU Ciptaker telah diputuskan Inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi pemerintah justru buat akal-akalan dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Fraksi PKS juga dengan tegas menolak Perppu Cipta Kerja tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan," tegas Netty.

"UU Ciptaker telah diputuskan Inkonstitusional bersyarat oleh MK, tapi pemerintah justru buat akal-akalan dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Fraksi PKS juga dengan tegas menolak Perppu Cipta Kerja tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan,"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI



SI PARTAI Keadilan Sejahtera DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



Anggota FPKS Optimis Pemerintah RI-Malaysia Tegas Lakukan Pengawasan pada PMI undocumented

Jakarta (17/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, mendukung upaya pemerintah terhadap tindak lanjut MOU terhadap Malaysia terkait PMI serta mendorong agar pengawasan terhadap PMI Non Prosedural diperketat dengan menyegerakan Sistem Rekalibrasi tenaga kerja 2.0.

"Saya mengapresiasi langkah-langkah Kemenaker terkait Pekerja Migran yang ditindak lanjuti dengan MOU antara Indonesia dan Malaysia, apalagi dengan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang bertemu dengan presiden dan berkomitmen akan perbaikan mengenai kesejahteraan dan keadilanbagi PMI, jadi saya semakin optimistis," ucap Alifudin.

Wakil Rakyat asal Kalimantan Barat tersebut juga menambahkan bahwa, dengan Komitmen Anwar Ibrahim terkait permasalahan PMI ilegal yang akan dibuatkan aturan tegas terhadap agensi, pekerja migran, maupun pemberi kerjanya akan dihukum sesuai aturan yang ada, maka sebagai warga negara yang baik harus yakin dan berfikir positif

"Karena, kalau secara ilmu ya, bahwa kalau kita berfikir positif, kedepan bisa jadi aturan tentang PMI ini akan positif, dan permasalahan PMI Ilegal ini bisa diselesaikan, apalagi

kalimantan Barat dahil saya, yang berbatasan langsung dengan malaysia, maka pemerintah wajib berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengawasi dengan maksimal dan diberikannya fasilitas yang lengkap dan mumpuni di setiap pos perbatasannya," tambah Alifudin

Selain itu, Alifudin juga menegaskan, bahwa program elaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia (Rekalibrasi Tenaga Kerja 2.0) harus segera direalisasi, tapi jangan sampai malah membuat bertambahnya PMI ilegal masuk malaysia, karena aturan yang tidak jelas.

"Mohon maaf, karena hampir rata-rata orang Indonesia bekerja di malaysia itu alasannya gaji yang memadai, makannya apapun caranya mereka harus bisa bekerja di malaysia walaupun ilegal, nah disini pemerintah harus hadir dengan kebijakan serta pengawasan yang mempermuh dan berpihak terhadap pekerja migran Indonesia" jelas Alifudin.

Dengan Komitmen Anwar Ibrahim terkait permasalahan PMI Ilegal yang akan dibuatkan aturan tegas terhadap agensi, pekerja migran, maupun pemberi kerjanya akan dihukum sesuai aturan yang ada, maka sebagai warga negara yang baik harus yakin dan berfikir positif Karena, kalau secara ilmu ya, bahwa kalau kita berfikir positif, kedepan bisa jadi aturan tentang PMI ini akan positif, dan permasalahan PMI Ilegal ini bisa diselesaikan,

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif



Hj. Ledia Hanifa A,
S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Isra'

Mi'raj

27 Rajab 1444H/18 Februari 2023

Dakwah Rasulullah
Menebar Islam
Rahmatan lil 'Alamin





Praktik Joki Akademik, **Aleg PKS: Noda Buruk Dunia Pendidikan, Harus Ditindak Tegas!**

Jakarta (12/02) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes, menyampaikan keprihatinan dan meminta Pemerintah bertindak tegas terkait praktik 'Joki' di dunia Pendidikan Indonesia.

Sebagai informasi Investigasi Harian Kompas memukam banyaknya kasus yang melibatkan calon Guru Besar dalam hal perijokian penulisan artikel ilmiah. Ironisnya perijokian melibatkan pejabat struktural kampus, dosen hingga mahasiswa.

"Saat ini Panitia Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI sedang menyiapkan laporan kerjanya dan menemukan banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam peningkatan mutu Perguruan Tinggi kita. Secara umum mutu Pendidikan Tinggi kita masih jauh dari harapan." Disampaikan Fahmy Alaydroes lewat rilis pers pada hari Ahad (12/10) di Jakarta.

Fahmy mengatakan bahwa penodaan integritas akademik yang dilakukan oknum calon Guru Besar boleh jadi mendapat bantuan dari pihak Kampus, tentu saja menambah berat lagi permasalahan pendidikan tinggi nasional.

"Moralitas akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para Guru Besar, justru dilanggar begitu saja tanpa 'tahu malu' oleh para oknum". Ucap Fahmy

Anggota Legislatif daerah Pemilihan Kabupaten Bogor ini mengingatkan kepada Kemendikbud Ristek seharusnya menindaklanjuti laporan investigasi Harian Kompas ini secara

komprehensif dan cepat. Jangan sampai noda buruk yang dilakukan oknum calon Guru Besar ini mencemari dunia Pendidikan Tinggi nasional.

"Harus ada sanksi dan hukuman yang sepadan kepada yang terbukti melakukan tindakan tercela agar tidak lagi diulangi dan ditiru oleh yang lain" Tegas Fahmy.

Fahmy menambahkan jumlah Perguruan Tinggi Negeri yang terakreditasi A hanya 34%, selebihnya terakreditasi biasa-biasa saja, B atau C, bahkan belum terakreditasi. Perguruan Tinggi Swasta, lebih parah lagi, hanya 2% yang terakreditasi A, selebihnya hanya terakreditasi B (23%), dan C (36%), belum terakreditasi 40%.

"Tahun 2023 ini, ranking Perguruan Tinggi kita berdasarkan QS World University Ranking, hanya 4 Perguruan Tinggi yang berada pada ranking 100-an, satu Perguruan Tinggi ada di ranking 400-an, dan sisanya ranking ke 700 an sampai seribu-an." Pungkasnya.



Penodaan integritas akademik yang dilakukan oknum calon Guru Besar boleh jadi mendapat bantuan dari pihak Kampus, tentu saja menambah berat lagi permasalahan pendidikan tinggi nasional.

Moralitas akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para Guru Besar, justru dilanggar begitu saja tanpa 'tahu malu' oleh para oknum"

**Dr. H. FAHMY
ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI



Guru Honorer Kirim Surat Cinta ke Nadiem, Aleg PKS: Akan Kami Sampaikan dan Terus Suarakan

Jakarta (17/02) --- Sejumlah guru yang terhimpun pada komunitas guru honorer mengirimkan surat cinta kepada Menteri Nadiem Makarim. Surat tersebut disampaikan melalui Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI untuk dapat diteruskan kepada Menteri, Kamis (16/02/2023).

Para Guru mengungkapkan keluh kesah yang mereka alami, tentang nasib mereka yang belum mendapat kepastian, juga menagih komitmen menteri.

Dalam suratnya, Rantau Al Islami, Ketua FH PGRI Kabupaten Bondowoso menyebutkan bahwa guru honorer negeri dan swasta juga PTT se Jawa Timur mengalami berbagai persoalan. Persoalan tersebut diantaranya honorarium yang terlambat berbulan-bulan. Ada juga yang tidak digaji.

"Bisakah pemerintah membuat regulasi terkait honorarium khusus bagi honorer seperti pencairan BSU tahun 2019 lalu yang langsung masuk rekening?" ujar Rantau dalam suratnya.

Ia juga menyebutkan soal seleksi PPPK 2022 yang belum selesai. Selain itu, terdapat aduan yakni adanya pungutan liar yang meminta P2 dan P3 untuk membayar RP 2,5 juta per orang atau lebih karena

tertundanya jadwal dan pelaksanaan observasi.

"Hal semacam ini sangat merugikan teman-teman honorer," tambahnya.

Hasan, Ketua FGPPNS Kota Palembang dalam suratnya meminta empati karena statusnya sebagai guru honorer yang sangat dibedakan, didiskriminasi karena tidak bisa ikut observasi dan sebagian dipanggil untuk bersiap mencari sekolah lain oleh kepala sekolah masing-masing.

Sementara itu, Hasna, seorang guru yang telah lulus passing grade pada tahap 1 dan 2 tahun 2021 awalnya merasa optimis nasibnya akan lebih baik, tetapi tidak kunjung mendapat kepastian dan banyak yang dipecah terutama dari sekolah swasta.

"Teman-teman ada yang sampai berjualan karena tidak mempunyai penghasilan lagi. Tolonglah jangan buat kami jadi depresi."

Salah seorang guru lulus passing grade juga bersurat, "Kami guru lulus passing grade berjualan bersama dan lulus bersama namun harus kecewa lagi karena banyak guru yang telah Bapak janjikan dapat formatasi, nyatanya tidak dapat penempatan. Tahun lalu di Medan Bapak mengatakan guru lulus PG datanya akan masuk database dan akan dapat formatasi di 2022.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

"Saya sudah teruskan surat-surat tersebut ke mas menteri, semoga mau membaca dan mencari solusi buat mereka. Saya akan terus menyuarakan ini kalau memang belum ada penyelesaiannya dari Kementerian,"

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI



Erick Thohir Diharapkan Ikut Perhatikan Sepak Bola Amputasi

Jakarta (19/02) --- Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terpilih Erick Thohir diharapkan menaungi semua cabang sepak bola di Indonesia. Termasuk Timnas sepak bola amputasi yang pada 2022 lalu ikut berlaga di ajang Piala Dunia Turki.

Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah kepada [Jurnas.com](https://www.jurnas.com), Kamis (16/2).

"PSSI harus dapat menaungi semua cabang. Bukan hanya sepak bolanya saja. Sepak bola amputasi juga sudah masuk piala dunia, berharap 4 tahun lagi bisa masuk piala dunia dan bisa lolos kualifikasinya. Tentu perlu perhatian yang juga baik," terang dia.

Ledia menjadi salah satu perwakilan yang mendampingi Timnas sepak bola amputasi berlaga di Piala Dunia Turki 2022. Timnas tercatat berada di peringkat 22 setelah mengalahkan Jerman dengan skor 2-0.

"Alhamdulillah juga udah dapat perhatian dari pengurus sebelumnya, tinggal kemudian untuk pembinaan dan pengembangan sepak bola amputasi jadi lebih penting," jelasnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini juga berharap perhatian lebih dapat diberikan kepada

sepak bola putri dan anak-anak yang selama ini membawa nama baik Indonesia.

"Jadi memang ini perlu semua diperhatikan dan dikembangkan dibina dengan sungguh-sungguh sehingga sistemnya berjalan baik. Kompetisinya berjalan produktif dan berkualitas. Wasitnya, pelaksanaannya pemainnya pelatihnya semua bersikap sportif. Penontonnya juga bisa didedukasi," terang Ledia.

"Mari kita sama-sama menguatkan pemangku

kepentingan sepak bola di Indonesia, jangan cuma berpikir industrinya saja, tetapi juga harus berpikir bagaimana pembinaan olahraga sepakbola untuk Indonesia ke depannya. Kita sudah punya Inpres percepatan sepakbola Indonesia, maka itu seharusnya bisa berjalan dan berhasil baik serta memberikan kontribusi baik bagi bangsa Indonesia," imbuh Legislator Dapil Jawa Barat I ini.

Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023-2027. Kepastian itu diketahui setelah Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) rampung diselenggarakan pada Kamis (16/2).

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



"PSSI harus dapat menaungi semua cabang. Bukan hanya sepak bolanya saja. Sepak bola amputasi juga sudah masuk piala dunia, berharap 4 tahun lagi bisa masuk piala dunia dan bisa lolos kualifikasinya. Tentu perlu perhatian yang juga baik,"

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI



PPPK Dinilai Bentuk
Diskriminasi

Sakinah Aljufri Terima Keluhan Guru SMAN 1 Denpasar

Jakarta (23/02) --- Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri menerima keluhan dari Guru SMAN 1 Denpasar, Provinsi Bali. Dalam keluhannya, para guru tersebut menyampaikan curhat kepada Sakinah Aljufri bahwa Program PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja) menurutnya sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap tenaga pendidik.

"Menurut mereka, Program PPPK ini sebuah bentuk diskriminasi terhadap tenaga pendidik. Karena ada, di bidang kesehatan, tenaga kesehatan diberikan fasilitas berupa pengangkatan langsung menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil), bukan PPPK seperti guru," ungkap Sakinah Aljufri saat melakukan reses akinah Aljufri dengan saat mengunjungi SMAN 1 Denpasar, Bali, baru-baru ini.

Padahal, lanjutnya, guru lah yang "menciptakan" dokter, perawat, dan segala profesi lainnya. Sehingga, sejatinya guru juga mendapat perlakuan yang sama dengan profesi lainnya seperti perawat atau tenaga medis lainnya, yakni menjadi CPNS.

Adanya diskriminasi ini, menurut Sakinah, semakin meyakinkan peribahasa bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Diakui Politisi

dari Fraksi PKS ini, keluhan seperti ini tidak hanya berasal dari SMAN 1 Denpasar saja. Melainkan juga hampir dari seluruh guru di Indonesia.

Dalam kesempatan itu Sakinah kembali menegaskan bahwa Komisi X DPR pun

sebenarnya lebih menginginkan pengangkatan guru menjadi CPNS. Sampai sekarang pun, tegasnya, masih terus diperjuangkan oleh Komisi X. Sehingga, dengan masukan dan keluhan dari guru di Denpasar ini, ia berkomitmen bahwa Komisi X akan kembali mendiskusikan dan memperjuangkannya dengan Mendikbudristek RI.

"Sehingga tidak ada lagi itu peribahasa guru pahlawan tanpa tanda jasa. Yang benar, jasa guru harus dihargai," tegasnya.

Adanya diskriminasi ini semakin meyakinkan peribahasa bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa.

Diakui Politisi dari Fraksi PKS ini, keluhan seperti ini tidak hanya berasal dari SMAN 1 Denpasar saja. Melainkan juga hampir dari seluruh guru di Indonesia.

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Komisi X DPR RI

Terkait Calon Gubernur Baru BI Wakil Ketua FPKS: Harus Mampu Hadapi Tantangan ke Depan

Jakarta (23/02) — Anggota Legislatif Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram memberikan perhatiannya kepada Bank Indonesia. Ecky memaparkan tantangan dan harapannya untuk Bank Indonesia ke depan dengan diusulkan kembali Perry Warjiyo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028.

Bukan hal yang mengejutkan, imbuhnya, karena sejalan dengan capaian-capaiannya yang telah diperoleh selama lima tahun terakhir, khususnya dalam menghadapi 'krisis' ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Dalam situasi sulit tersebut, Bank Indonesia di bawah komando Perry Warjiyo mampu memformulasi secara tepat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dalam rangka menjalankan tugas utamanya," ungkap Ecky.

Anggota Komisi XI DPR RI

ini menjelaskan bahwa sepanjang pandemi, Bank Indonesia sebagai bank sentral secara konsisten menjaga tingkat inflasi inti berada di level rendah dan nilai tukar rupiah yang tetap stabil.

"Data menunjukkan bahwa tahun 2020 hingga 2022 tingkat inflasi inti berada di 1,06 persen, 1,56 persen dan 3,36 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah dari 2020 sampai dengan 2022 stabil di range Rp14.084-Rp16.367 per dolar AS," sebut Ecky.

Ecky menjelaskan bahwa saat ini dan ke depan sektor moneter semakin menghadapi tantangan fundamental.

"Beberapa tahun lalu, kita mengamati bahwa tugas Bank Indonesia bisa fokus ke pengelolaan nilai tukar. Tugas tersebut pun dihadapkan pada cadangan devisa yang terbatas sehingga Rupiah rentan tertekan." Ungkap Ecky.

Ecky melanjutkan, tantangan berikutnya adalah koordinasi Bank Indonesia dengan otoritas fiskal dan keuangan lainnya.

"Tantangan ini harus menjadi fokus Bank Indonesia, seiring dengan tujuan baru yang diamankan UU PPSK terkait dukungan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

Ecky menilai bahwa pimpinan Bank Indonesia yang menjadi nahkoda ke depan harus hati-hati merumuskan tools yang digunakan agar tidak terjebak oleh dominasi sektor moneter di dalam perekonomian.

Selain itu, Ecky menggaris-bawahi 'pekerjaan rumah' Bank Indonesia terkait persoalan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Selama ini banyak sekali eksportir migas, minerba, serta hasil bumi dan laut yang memilih memarkirkan devisa hasil ekspornya di luar negeri, akibatnya dukungan terhadap ekonomi domestik semakin rendah" jelas Ecky.

Semestinya, kata Ecky, Bank Indonesia sudah memiliki jurus jitu untuk menangani masalah DHE ini.

"Eksportir menjual SDA Indonesia, alangkah mirisnya jika uangnya tidak bisa menyokong pertumbuhan nasional," ungkap Ecky.

Selanjutnya yang tak kalah penting menjadi perhatian adalah tantangan digitalisasi. Di era serba digital saat ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perlu segera

bertransformasi menjadi bank sentral digital yang kredibel. Hal ini karena digitalisasi di berbagai sektor telah terjadi secara masif dan menjadi sebuah keniscayaan, khususnya di sektor keuangan.

"Pertanyaan mendasarnya adalah sudah sejauh mana Bank Indonesia bertransformasi, sehingga sebagai bank sentral dan otoritas, tidak tertinggal dari industri yang dinaunginya?" tutup Ecky.



"Selama ini banyak sekali eksportir migas, minerba, serta hasil bumi dan laut yang memilih memarkirkan devisa hasil ekspornya di luar negeri, akibatnya dukungan terhadap ekonomi domestik semakin rendah

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Wacana Subsidi Motor Listrik, **Aleg PKS: Pemerintah Harus Kaji Ulang!**

Jakarta (22/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati menegaskan pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik pada wawancara di salah satu stasiun radio swasta, Rabu (22/02/2023).

Diawal wawancara, Anis menjelaskan DPR RI telah memberikan masukan terkait kebijakan subsidi ini dan pembahasan masih berlanjut. Masih banyak prioritas kebijakan lain yang seharusnya diurus oleh pemerintah, terutama untuk penganggaran dengan jumlah besar seperti subsidi motor listrik ini.

“Kami sudah banyak memberikan masukan terkait pemberian subsidi ini. Bahkan Badan Anggaran DPR RI juga menegaskan tidak ada alokasi anggaran APBN 2023 untuk anggaran subsidi motor listrik ini. Banyak prioritas lain yang

harus diurus oleh pemerintah. Tidak sebanding dengan program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin,” ujar Anggota Komisi XI ini.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan subsidi ini dikeluarkan, seperti aspek keadilan, aspek demand, dan aspek produksi yang seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu.

“Aspek keadilannya. Ini buat siapa subsidi ini. Tentu saja bukan untuk golongan masyarakat miskin subsidi

motor listrik ini. Kemudian, demand nya, apakah sudah banyak atau belum, dan terakhir produksinya apakah sudah lengkap dan siap? Jangan sampai menggelontorkan uang yang begitu besar, tetapi tidak efektif. Amanat undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. kemiskinan kita masih tinggi loh,” tegas Anis.

Anis juga menguraikan terkait anggaran untuk subsidi ini merupakan kebijakan sendiri dari pemerintah. Meskipun, dirinya juga tidak kaget jika akhirnya pemerintah menggunakan APBN untuk melakukan subsidi ini.

“Pemerintah mungkin punya kebijakan sendiri karena tidak ada anggaran dari APBN 2023. Intinya adalah ketika uang itu digelontorkan harus efektif. apalagi kalo sumbernya dari APBN. Kereta Cepat bilangnya tidak dari APBN tapi kan akhirnya digunakan juga. Jika misalnya akan diambil dari APBN semua harus dipertanggungjawabkan, dan harus untuk kesejahteraan rakyat,” urai Anis.

Dalam paparannya, Anis menjelaskan bahwa insentif untuk kendaraan listrik sudah dikeluarkan, terutama insentif untuk perpajakan, baik untuk mobil listrik maupun motor listrik.

“Selama ini dukungan untuk insentif Pemerintah pada kendaraan listrik sudah cukup

banyak. Kalo di total, insentif perpajakan sudah 32% dari harga jual mobil listrik, kalo motor listrik sekitar 18%. Sudah cukup banyak insentifnya,” papar Anis.

Anis pun menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang, agar kebijakan ini tepat sasaran dan memperhatikan prioritas dan efektivitas dalam pembuatan kebijakan.

“Pemerintah harus

mengkaji ulang kebijakan insentif ini. Kebijakan yang diwanakan itu besar banget insentifnya, padahal masih banyak masalah-masalah kemiskinan, stunting, dan permasalahan lainnya, harusnya ada yang lebih prioritas, dan penting untuk memperhatikan efektivitas dari kebijakan yang akan dibuat,” tutup Anis.



“Selama ini dukungan untuk insentif Pemerintah pada kendaraan listrik sudah cukup banyak. Kalo di total, insentif perpajakan sudah 32% dari harga jual mobil listrik, kalo motor listrik sekitar 18%. Sudah cukup banyak insentifnya,”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



Soroti RUU Kesehatan,
**Baleg FPKS:
Tenaga Medis dan
Kesehatan Asing
Masuk, Tenaga
Lokal Tersingkir**

Jakarta (12/02) --- Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR dari Fraksi PKS, Hermanto berpendapat ada kerawanan dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau noninvestasi.

"Tenaga kesehatan Indonesia sangat mungkin tersingkirkan atas nama investasi atau alih teknologi," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Selain itu, lanjut Hermanto, terdapat kerawanan dalam kata investasi dan alih teknologi.

"Kata investasi dan alih teknologi itu sendiri artinya ada orientasi investasi dari luar negeri dalam bidang kesehatan. Jika menyangkut teknologi canggih terbaru, sangat mungkin menenggelamkan rumah sakit lokal terutama yang dibangun tanpa memiliki modal besar", papar legislator dari FPKS DPR ini.

"Karena hal tersebut dan hal-hal lain, FPKS menolak draft RUU tentang Kesehatan untuk dibahas pada tahap selanjutnya", tambah Hermanto.

Hal lain yang menyebabkan FPKS menolak

perubahan lanjutan draf RUU Kesehatan, lanjut Hermanto, diantaranya karena ada pengaturan dalam beberapa UU yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini.

"Antara lain, dihapuskannya aturan mengenai SIPB badan, yang dalam RUU ini hanya dinyatakan akan diatur dalam peraturan

pemerintah", ujarnya.

Juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan.

"Hal tersebut akan menimbulkan kekosongan hukum", tandas legislator dari Dapil Sumbang I ini.

Menurut Hermanto, seharusnya draft RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

"Kata investasi dan alih teknologi itu sendiri artinya ada orientasi investasi dari luar negeri dalam bidang kesehatan. Jika menyangkut teknologi canggih terbaru, sangat mungkin menenggelamkan rumah sakit lokal terutama yang dibangun tanpa memiliki modal besar",

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Badan Legislatif DPR RI



Tolak RUU Kesehatan
Jadi Inisiatif DPR,
**Aleg PKS: Jangan
Terburu-Buru
untuk Dibahas
dan Disahkan!**

Jakarta (12/02) --- Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, mewanti-wanti agar pembahasan RUU tentang Kesehatan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Hal ini disampaikan dalam diskusi publik terkait RUU Kesehatan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia, pada Minggu malam (12/02/2023).

"Kita sepakat bahwa memang undang-undang terkait kesehatan di negara kita ada yang perlu diperbaiki. Masalahnya, yang diubah yang sebelah mana? Ketika berbicara sistem kesehatan secara keseluruhan, jika ingin diperbaiki, jangan tanggung-tanggung. Jangan separuh saja, dan harus dengan prinsip kehati-hatian", tegas Ledia.

Oleh sebab itu, imbuhnya, Fraksi PKS DPR RI meminta agar Pemerintah bersama DPR jangan terkesan kejar tayang untuk menyelesaikan RUU Kesehatan. Terlebih, RUU ini menggunakan metode omnibus dalam pembentukannya.

"Kita perlu hati-hati karena metode yang dipilih adalah metode omnibus. Jangan sampai ada kekosongan pengaturan, tumpang tindih pengaturan, ataupun kontradiksi pengaturan. Misal yang kita temukan, ada sejumlah pasal di dalam UU

Rumah Sakit tidak masuk dalam RUU Kesehatan, demikian juga dengan pengaturan soal kebidanan. Jadi, memang kehati-hatian menjadi sangat penting. Jangan sampai ada persoalan baru", tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Ledia ialah soal sistem pelayanan kesehatan komprehensif.

"Di RUU Kesehatan masih terkesan nuansa yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, sedangkan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif belum termuat secara komprehensif

sebagai sebuah sistem. Kita belum bicara soal sistem untuk membangun kesehatan masyarakat yang baik, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, dan seterusnya. Hal ini harus jelas, bukan hanya tertulis sekadarnya saja. Menurut saya, ini masih luput", ujarnya menjelaskan.

Terakhir, Ledia pun menyebut, meski sudah ada 26 stakeholders yang diundang dalam pembahasan DIM, menurutnya tetap diperlukan konfirmasi ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam RUU Kesehatan secara mendetail.

"Maka kami meminta waktunya jangan grasu-grusu. Harus disisir secara menyeluruh karena hal ini terkait dengan tujuan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik ke depannya", pungkasa Ledia.

"Di RUU Kesehatan masih terkesan nuansa yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, sedangkan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif belum termuat secara komprehensif sebagai sebuah sistem.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Fraksi PKS Menolak Penetapan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang!

Jakarta (15/02) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak., menyampaikan penolakan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hal ini disampaikan oleh Amin Ak., dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/02).

Dalam pemaparannya, Amin menyebut bahwa penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja karena TIDAK MENGAKOMODASI poin-poin perbaikan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Cipta Kerja sama sekali tidak menjawab amanat putusan Mahkamah Konstitusi

yang sudah menetapkan koridor perbaikan secara prosedural dan materiil terhadap UU tentang Cipta Kerja sehingga penerbitan Perpu ini tidak menggugurkan status 'inkonstitusional bersyarat' terhadap UU tentang Cipta Kerja", tegas Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Amin Ak., menyebut bahwa Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya 'hal ikhwal kegentingan yang memaksa'.

"Fraksi PKS menilai alasan Pemerintah untuk menerbitkan

Perpu tidak terukur dan kurang tepat, dibandingkan dengan melakukan revisi terhadap UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja", tegasnya lagi.

Menurut Amin, meskipun ekonomi global melambat, seperti sudah terjadi sejak pertengahan 2022, namun pemulihan ekonomi nasional relatif stabil. Kondisi saat ini justru menunjukkan tidak adanya potensi resesi, krisis, maupun ancaman inflasi tinggi.

"Oleh sebab itu, Fraksi PKS menilai bahwa berdasarkan kondisi ekonomi tersebut, maka tidak ada urgensi yang genting dan mendesak yang bisa dijadikan dasar untuk Pemerintah menerbitkan Perpu", jelasnya.

Selain itu, ia pun beranggapan bahwa keputusan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tentang Cipta Kerja dengan mengesampingkan pilihan untuk melakukan revisi UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi dengan melibatkan DPR.

"Hal ini merupakan manifestasi kekuasaan yang jauh dari penghormatan terhadap semangat demokrasi yang mengedepankan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya", ujarnya lagi.

Atas dari itu, imbuh Amin, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(F-PKS) meminta agar Perpu tentang Cipta Kerja dicabut dengan mengutar segala akibat hukum dari pencabutan tersebut. Di sisi lain, meminta agar segera melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), mendorong agar dilakukan perbaikan terhadap UU Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme perubahan undang-undang di DPR dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan maksimal sejalan dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja", pungkas Amin.



Fraksi PKS menilai alasan Pemerintah untuk menerbitkan Perpu tidak terukur dan kurang tepat, dibandingkan dengan melakukan revisi terhadap UU tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi di DPR sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Formil UU tentang Cipta Kerja

AMIN AK, M.M.
Anggota Badan Legislasi DPR RI



Hanya FPKS Tolak RUU Kesehatan Jadi Inisiatif DPR,

Pengelolaan Kesehatan Untungkan Asing dan Pemilik Modal

Jakarta (14/02) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan penolakan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

F-PKS menilai penyusunan RUU tentang Kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi agar nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik. Karena itu, mewakili Fraksi PKS, Ansory Siregar memberikan sebelas catatan terhadap draf RUU tentang Kesehatan itu.

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak draf Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI," ujar Ansory Siregar ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap RUU tentang Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dalam menyusun RUU tentang Kesehatan, F-PKS menilai harus mencakup seluruh perbaikan dalam sistem

Kesehatan Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun sejumlah catatan yang diberikan F-PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan. Pertama, F-PKS berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu mendapatkan layanan kesehatan yang

berkualitas. Sehingga, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draf RUU Kesehatan.

"Kedua, F-PKS berpendapat penyusunan RUU Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus tidak boleh menyebabkan kekosongan pengaturan, kontradiksi pengaturan, dan juga harus memastikan partisipasi bermakna dalam penyusunan, mengingat banyaknya undang-undang yang akan terdampak dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan tersebut. Ketiga, F-PKS berpendapat bahwa ada pengaturan dalam beberapa UU

BERIKUTNYA >>>

Di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya draf RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Hanya Fraksi PKS ...

« SEBELUMNYA

yang dihapuskan dalam draf RUU Kesehatan ini. Sehingga, hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum," tuturnya.

Keempat, F-PKS

berpendapat dimunculkannya Pasal 395 pada RUU Kesehatan yang berbunyi Dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah mengakibatkan kerugian harta benda pada masyarakat, Pemerintah Pusat harus memberikan ganti rugi, merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap rakyat di masa sulit yaitu ketika wabah melanda. Lantaran dalam kondisi tersebut sangat mungkin rakyat akan kesulitan mengakses kebutuhan dasar, sehingga ganti rugi tidak akan menyelesaikan masalah rakyat saat itu.

"Frasa ganti rugi memungkinkan terjadinya penundaan atau pemenuhan kebutuhan yang tidak mencukupi, padahal saat itu penduduk yang kehilangan mata pencaharian tidak dapat membeli kebutuhan pokok. Selain itu, klausul tersebut juga beresiko multi-tafsir. Apakah kehilangan mata pencaharian atau penurunan pendapatan

keluarga termasuk dalam kerugian harta benda? Jika ditafsirkan termasuk, maka negara akan menanggung beban yang berkali-kali lipat besarnya," jelasnya.

Kelima, F-PKS

berpendapat bahwa penugasan pemerintah kepada BPJS yang merupakan badan hukum publik yang bersifat independen, maka harus disertai dengan kewajiban pemerintah dalam pendanaannya.

"Keenam, F-PKS

berpendapat, sangat tidak layak memasukkan klausul Asuransi Kesehatan komersial yang disandingkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Asuransi komersial seharusnya memiliki aturan tersendiri yang tidak dihubungkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketujuh, F-PKS berpendapat, terdapat beberapa konsepsi yang kurang tepat dalam RUU Kesehatan yang timbul dari keterburuburuan dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat. Kedelapan, F-PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draf RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada

fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi," jelasnya.

Kesembilan, F-PKS

berpendapat bahwa di semua negara pengaturan tentang profesi kesehatan diatur dalam UU tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya draf RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

"Kesepuluh, F-PKS

berpendapat bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia. Terakhir, kesebelas, F-PKS berpendapat, RUU berpotensi mengarahkan pengelolaan kesehatan rakyat Indonesia kepada mekanisme pasar yang cenderung menguntungkan pemilik modal," pungkasnya.



Sangat tidak layak memasukkan klausul Asuransi Kesehatan komersial yang disandingkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Asuransi komersial seharusnya memiliki aturan tersendiri yang tidak dihubungkan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

H. ANSORY SIREGAR, Lc,
 Anggota Badan Legislasi DPR RI



Mengarah pada Liberalisasi dan Lemahkan Jaminan Kesehatan untuk Rakyat, FPKS Tolak RUU Kesehatan

Fraksi PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draft RUU Kesehatan pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga Kesehatan warga negara asing dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non investasi

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

Keliling Dapil, Andi Akmal Lakukan Pengawasan dan Evaluasi 8 Titik Penerima Bantuan

Kabupaten Bone (13/02) -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, di daerah pemilihannya melakukan evaluasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pada penerima-penerima bantuan yang telah ia salurkan dimana bantuan ini merupakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Akmal menjelaskan, bantuan untuk masyarakat berasal dari mitra kerja di Komisi IV yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan Perikanan.

“Untuk pengeringan padi saja sudah 5 lokasi tersebar di dapil II Sulawesi Selatan. Tahun 2023 ini akan kami upayakan terus berbagai bantuan kemasyarakatan yang merupakan pemberdayaan masyarakat agar turut berkontribusi terhadap ketahanan pangan,

mempertahankan kualitas lingkungan dan meningkatkan konsumsi gizi protein dari produk perikanan,” tutur Akmal.

Politisi PKS ini sudah berada di DPR RI sejak tahun 2024 telah berkeliling di 9 kabupaten Kota yang terdiri dari Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Soppeng, Wajo dan Kota Parepare. Semua kegiatan ini dalam rangka serap aspirasi hingga penyaluran bantuan sebagai bagian tugas anggota DPR terpilih.

Akmal menambahkan, bantuan alsintan, bibit tanaman pangan maupun perkebunan, peternakan seperti sapi, kambing atau unggas, merupakan sebagian bantuan yang telah turun berkatnya di dapil. Namun demikian, lanjutnya, masih banyak masyarakat kelompok tani, kelompok peternak, kelompok perikanan dan berbagai organisasi masyarakat di daerah Sulsel yang belum mendapat bantuan pemerintah. Ia mengatakan, begitu banyaknya antusias masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah, dan yang ia lakukan adalah trigger, karena sesungguhnya, yang mesti terjun langsung ke masyarakat adalah para petugas yang tersebar di kementerian.

“Alhamdulillah team kami sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota yang merupakan bagian dari Dapil Sulsel II. Team yang tergabung dalam relawan AAP ini yang merupakan tangan panjang kami di daerah-daerah, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi advokasi serap aspirasi. Semoga kinerja ini tetap berjalan, sehingga mampu memberi manfaat bagi masyarakat banyak, dan penerima bantuan dapat memberikan manfaat pada warga sekitarnya,” tutup Andi Akmal Pasluddin.



“Alhamdulillah team kami sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota yang merupakan bagian dari Dapil Sulsel II. Team yang tergabung dalam relawan AAP ini yang merupakan tangan panjang kami di daerah-daerah, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi advokasi serap aspirasi.

**DR. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II



Kunjungi Pesisir Selatan, Hermanto Serahkan Berbagai Bantuan untuk Petani



Padang (13/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pesisir Selatan melakukan roadshow menyerahkan berbagai bantuan pemerintah untuk petani.

Bantuan yang diserahkan itu berupa sapi indukan, unit pengolahan pupuk organik (UPPO), jalan usaha tani (JUT), pekarangan pangan lestari (P2L) dan jaringan irigasi tersier.

"Dana pengadaan berbagai jenis alsintan ini berasal dari APBN. Sebagai wujud negara ada untuk rakyat khususnya petani," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Hermanto meminta kepada para penerima agar mengelola bantuan tersebut dengan sungguh-sungguh.

"Bantuan tersebut jangan dianggap sebagai hibah tapi anggaplah sebagai modal. Modal, kalau dikelola secara sungguh-sungguh maka secara bertahap akan berkembang", papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

"Kalau sudah berkembang maka saat itulah penerima bisa menikmati hasilnya berupa tambahan kesejahteraan", pungkas legislator dari Komisi IV DPR RI ini.

Kelompok-kelompok yang beruntung menerima bantuan

adalah antara lain, Pertama, penerima sapi indukan: Poktan Sapta Marga, Lubuk Betung Kecamatan Hilir Nagari Indrapura Utara Kecamatan Air Pura.

"Kedua penerima UPPO: Kelompok Tani Silaturahmi, Kampung Sungai Sirah Mudiak, Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti; dan kelompok tani Pincuran Boga, Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai," sebut Hermanto.

Ketiga, imbuhnya, penerima JUT yakni Kelompok Tani Ampuan Baru, Kampung Bungo Pasang I Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai

"Keempat, penerima P2L: KWT Karpa Indah, Nagari Gurun Panjang Selatan, Kecamatan Bayang," tambahhya.

Kelima, kata Hermanto, penerima irigasi tersier yaitu Poktan Cumateh, Kampung Cumateh, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan.

Dalam roadshow penyerahan bantuan di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut Hermanto didampingi tokoh muda setempat Efrianto, Eko Kurniawan dan Saprul.

"Bantuan tersebut jangan dianggap sebagai hibah tapi anggaplah sebagai modal. Modal, kalau dikelola secara sungguh-sungguh maka secara bertahap akan berkembang, Kalau sudah berkembang maka saat itulah penerima bisa menikmati hasilnya berupa tambahan kesejahteraan

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I



Komisi XI FPKS: Rupiah Salah Satu Simbol Kedaulatan NKRI

Lampung (25/02) -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly, turut hadir dalam acara Partisipasi Edukasi Publik dengan tema Cinta, Bangga dan Paham Rupiah (CBP) yang diselenggarakan Yayasan Indesa dan Bank Indonesia di Desa Sumbergede Kec. Sekampung, Kabupaten Lampung Timur (21/02/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Junaidi Auly menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting dalam rangka memberikan berbagai informasi kepada masyarakat bagaimana cara memperlakukan uang Rupiah secara tepat.

Putra asli kelahiran Lampung ini berharap Bank Indonesia agar terus melakukan edukasi dalam rangka meningkatkan kecintaan, kebanggan dan pemahanan Rupiah.

Junaidi menambahkan penguatan kecintaan, kebanggan dan pemahanan Rupiah kepada masyarakat juga

akan menguatkan peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS mengingatkan bahwa rupiah bukan sekedar alat pembayaran semata, melainkan juga rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan NKRI dan alat pemersatu bangsa.

“Diharapkan kedepannya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merusak Rupiah, karena dengan menjaga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan negara”, tutup Junaidi.

“Diharapkan kedepannya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merusak Rupiah, karena dengan menjaga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan negara”,

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung I



Silahturahmi dengan Mahasiswa Penerima KIP Kuliah, Aleg PKS: Semoga Bermanfaat

Lubuk Linggau (25/02) – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menghadiri pertemuan dengan Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP Kuliah

melalui aspirasi dalam rangkaian agenda reses di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pada Sabtu (25/02).

Dalam kesempatan ini, Mustafa mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah mendapat beasiswa KIP kuliah.

"Selamat kepada semuanya. Semoga beasiswa bermanfaat dan bisa mengantarkan adik-adik sekalian untuk mewujudkan cita-cita yang diimpikan", ujarnya.

Lebih lanjut, ia berpesan kepada para mahasiswa agar bersungguh-sungguh dalam mengejar impian.

"Kita harus mencintai dengan apa yang kita kerjakan, dalam hal ini jurusan yang kita pilih, supaya kita bisa belajar dengan maksimal sehingga dapat meraih cita-cita kita", imbuhnya.

Terakhir, Mustafa berpesan agar para mahasiswa memanfaatkan beasiswa KIP Kuliah dengan sebaik baiknya.

"Jangan gunakan uang beasiswa diluar kepentingan kuliah, belajar dengan tekun dan menjadi mahasiswa yang berprestasi", pungkasnya.

Adapun, di kesempatan yang sama, salah seorang perwakilan mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mustafa Kamal.

"Terimakasih kepada Bapak Mustafa Kamal. Berkat bapak kami bisa kuliah sampai dengan lulus, kuliah saya juga lancar, aman sentosa karena beasiswa ini. Alhamdulillah", ujar mahasiswa tersebut.

"Kita harus mencintai dengan apa yang kita kerjakan, dalam hal ini jurusan yang kita pilih, supaya kita bisa belajar dengan maksimal sehingga dapat meraih cita-cita kita",

H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Selatan I



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Atraktif Substantif

1 Bulan Menjelang Ramadhan

اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا

رمضان

**Habib Aboe
Bakar Alhabsyi**
Sekjen DPP PKS



Bersama Tokoh Pasaman

Nevi Zuairina Sampaikan Peran Wanita Indonesia



Kabupaten Pasaman (20/02) — Syukur nikmat disampaikan oleh Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina pada acara wirid Rawiya Kabupaten Pasaman. Tokoh masyarakat berkumpul dan juga dihadiri ratusan ibu-ibu jamaah pengajian dari berbagai penjuru di pasaman untuk melakukan wirid bersama yang di himpun dalam Rabithah Wirid Yasin (RAWIYA).

“Saya mengajak para hadirin untuk mengingat kembali sosok ibu sebagai insan yang sangat dimuliakan. Sosok ibu adalah seorang perempuan yang sangat kuat, tak mudah menyerah oleh keadaan dan tak pernah lelah berjuang untuk keluarga,” tutur Nevi dalam mengawali sambutannya.

Legislator yang aktif di organisasi kemasyarakatan ini menggambarkan tentang ibu yang hingga kini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang pribadi diri, baik sebagai seorang individu, wanita, istri dan peran lainnya di masyarakat.

“Ibu adalah tokoh pertama yang terekam oleh memori seorang anak manusia sepanjang hidupnya. Sedikit banyak jejak rekam seorang ibunda akan mempresentasikan karakter anak nantinya. Tak salah rasanya jika ada kalimat : Ibu adalah madrasah/sekolah

pertama bagi anak-anaknya,” tambah Nevi.

Politisi PKS ini menjabarkan, Mengacu pada latar belakang sejarahnya, sudah semestinya peran Ibu tidak cukup hanya dimaknai dan diperingati sebagai hari kasih sayang kepada para ibu

dengan memanjakan para ibu., meskipun hal itu tidak salah. Memaknai peran Ibu seharusnya kita dapat mengambil semangat yang melatar belakangi sejarah peran ibu tersebut, yaitu semangat memperjuangkan hak-hak perempuan dan keterlibatan perempuan dalam membangun kualitas bangsa, apalagi jika meninjau masalah yang dialami perempuan masa kini yang semakin kompleks.

la meneruskan, Pembentukan karakter tidak boleh diserahkan tanggung jawabnya kepada lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dan jalur formal semata.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

Pembentukan karakter tidak boleh diserahkan tanggung jawabnya kepada lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dan jalur formal semata. Ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya justru memiliki peranan lebih besar dalam pembentukan karakter anak. Waktu anak lebih banyak bersama orang tua khususnya ibu.

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Hidayatullah Kembali Salurkan 4 Mobil Ambulans untuk Masyarakat Sumut

Medan (16/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayatullah, kembali menyalurkan empat mobil ambulans hasil advokasi kepada warga masyarakat di Sumatera Utara.

Seremonial penyerahan empat mobil ambulans ini dilaksanakan di parkir an Rumah Makan Cindelaras Jalan Karya Jaya No 109, Gedung Johor, Medan Johor, Sabtu (11/2) lalu. Keempat mobil ambulans ini akan beroperasi di empat wilayah, yaitu Tebingtinggi, Serdangbedagai, Deliserdang, dan Medan.

Menurut legislator senior PKS yang juga tokoh ekonomi Syariah Sumatera Utara ini, saat ini kesehatan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara.

"Masyarakat sangat membutuhkan layanan ambulans, terlebih paska wabah Covid-19 yang tidak

hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekonomi sehingga layanan ambulans berbayar tak terjangkau mereka," katanya.

Hidayatullah berharap, dengan ada bantuan ambulans ini bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Sejak tahun 2021, total sudah ada 12 mobil ambulans yang disalurkan Hidayatullah kepada masyarakat Sumatera Utara. Menurutnya, empat mobil ambulans yang saat ini disalurkan, diadvokasi melalui mitra kerja komisinya di DPR RI yaitu komisi XI.

Selengkapnya kunjungi fraksidr.pks.id

"Ambulans ini adalah bentuk advokasi aspirasi masyarakat melalui mitra kerja kita di Komisi XI DPR RI yang didalamnya ada BI, BRI, BNI dan Bank Mandiri,"

H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara I



Masa Reses, Johan Buka Pelatihan Budidaya Ikan dan Ajak Masyarakat Serious Upgrade Kemampuan



Kabupaten Sumbawa (21/02) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, hadir sekaligus membuka Pelatihan Budidaya Ikan Bandeng di Desa Penyaring, Kec. Moyo Utara. Selasa (21/02).

Dalam sambutannya, Johan berharap agar masyarakat mengikuti pelatihan dengan serius sebab Penyaring merupakan salah satu desa yang sangat mengandalkan sektor budidaya perikanan.

"Penyaring ini salah satu desa pembudidaya sektor perikanan. Saya liat banyak sekali petambak di tempat ini. Karenanya, dengan mengikuti pelatihan, saya berharap masyarakat bisa menambah ilmu, mengupgrade diri". Kata Politisi yang akrab disapa JR tersebut.

Johan juga menambahkan bahwa kegiatan bimtek ini tidak

dilaksanakan di sembarang tempat. Ia hanya dilaksanakan di dapil-dapil Anggota DPR yang berada di Komisi IV.

"Kemarin saya ke Lombok, mereka minta-minta diselenggarakan bimtek. Hari ini tanpa minta pun kita laksanakan di Penyaring karena ini dapilnya Anggota Komisi IV".

Hadir pula dalam acara tersebut Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa, Kepala Desa Penyaring, dan Kepala Balai Pusat Pelatihan Perikanan Banyuwangi.

”

"Penyaring ini salah satu desa pembudidaya sektor perikanan. Saya liat banyak sekali petambak di tempat ini. Karenanya, dengan mengikuti pelatihan, saya berharap masyarakat bisa menambah ilmu, mengupgrade diri".

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I



Saat Reses, Alifudin Bagikan Hadiah Jilbab Kepada Ibu-Ibu di Dapil



Kubu Raya (21/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, memberikan puluhan hadiah jilbab kepada ibu-ibu yang bertanya dan menjawab pertanyaan saat Reses berlangsung di Dapil.

"Ini ada hadiah jilbab bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, dan yang bertanya apalagi memberikan aspirasi ke saya," ucap Alifudin, Selasa (21/02).

Alifudin yang juga ketua BPW PKS Kalimantan berharap ibu-ibu yang diberikan hadiah jilbab atau kerudung agar bisa dipakai juga saat mengikuti pengajian.

"Semoga dengan diberikannya hadiah jilbab ini bisa menambah ketaqwaan ibu-

ibu dan juga semangat dalam menjalani ibadah kepada Allah SWT," kata Alifudin.

Salah satu penerima hadiah jilbab, Diana, menuturkan bahwa sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Alifudin di Kubu Raya dan pemberian jilbabnya.

"Makasih pa Alif, jilbab ini nanti dipake untuk ngaji dan sekalian bantu kampanye juga, sekali lagi terima kasih Pa Alif," ucap Diana.

"Ini ada hadiah jilbab bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, dan yang bertanya apalagi memberikan aspirasi ke saya, Semoga dengan diberikannya hadiah jilbab ini bisa menambah ketaqwaan ibu-ibu dan juga semangat dalam menjalani ibadah kepada Allah SWT," "

H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I



Kurniasih Resmikan Padat Karya Pembangunan Jembatan di Pesanggrahan

Jakarta (16/02) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meresmikan jembatan yang digunakan warga di Jln Dahlia 2 Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Pembangunan dan renovasi jembatan di wilayah tersebut adalah bagian dari program Padat Karya Kementerian Tenaga Kerja.

Kurniasih mengatakan, program ini harapannya bisa menjadi salah satu penyerap tenaga kerja untuk infrastruktur, di sisi lain masyarakat mendapat manfaat dari perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

"Intinya dana dari rakyat harus kembali ke rakyat sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang jauh lebih bagus," ungkap Kurniasih.

Kurniasih menambahkan, jembatan ini merupakan akses utama dan penting bagi

masyarakat di Pesanggrahan. Sehingga ketika ada usulan untuk renovasi, pihaknya mencoba mencari solusi.

"Alhamdulillah bisa terlaksana karena laporan sebelumnya dengan kondisi yang kurang bagus infonya ada yang sering jatuh. Semoga masyarakat bisa terus mendapatkan manfaat dari pembangunan ini," katanya.

Kurniasih mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan warga di wilayah Jln Dahlia 2 Pesanggrahan.

"Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, semakin baik infrastruktur semakin lancar aktivitas warga," imbuhnya.

Alhamdulillah bisa terlaksana karena laporan sebelumnya dengan kondisi yang kurang bagus infonya ada yang sering jatuh. Semoga masyarakat bisa terus mendapatkan manfaat dari pembangunan ini

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI, M.Si.**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI



Gandeng PT PIM, Rafli Kembali Bantu Renovasi Rumah Warga di Aceh

Anggota DPR RI Komisi VI asal Aceh Rafli, diketahui mengarahkan usulan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari sejumlah perusahaan plat merah jajaran Kementerian BUMN, agar pemanfaatannya tepat sasaran dan dirasakan merata oleh rakyat Indonesia.

Aceh Utara (15/02) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Rafli bersama mitra kerja Komisi VI jajaran Kementerian BUMN PT PIM membantu renovasi rumah warga membutuhkan di Desa Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Serah terima bantuan untuk masyarakat dhuafa tersebut dilakukan melalui Yayasan Lentera Muda Karya (LEMKA) Aceh, kepada Rukiyah selaku penerima manfaat, pada Sabtu (11/02/2022).

Menurut Pembina Yayasan Lemka, Aminullah, rehabilitasi rumah untuk dhuafa dan masyarakat membutuhkan rutin dikerjakan secara bertahap di seluruh Aceh.

"Anggaran bersumber dari CSR sejumlah mitra kerja Komisi VI DPR RI. Kali ini dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) jajaran Kementerian BUMN" ujarnya

"Sebagai yayasan bergerak di bidang sosial, kita terus berusaha maksimalkan program-program bermanfaat untuk masyarakat banyak, diantaranya rehabilitasi rumah dhuafa" imbuh Ami. Salah satu warga penerima bantuan, Rukiyah

usai serah terima mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan renovasi rumah yang ia terima.

"Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak Rafli yang telah sudi membantu untuk merehab rumah saya, hanya Allah yang mampu membalas," ucap Rukiyah.

Anggota DPR RI Komisi VI asal Aceh Rafli, diketahui mengarahkan usulan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari sejumlah perusahaan plat merah jajaran Kementerian BUMN, agar pemanfaatannya tepat sasaran dan dirasakan merata oleh rakyat Indonesia.

Anggota DPR RI Komisi VI asal Aceh Rafli, diketahui mengarahkan usulan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari sejumlah perusahaan plat merah jajaran Kementerian BUMN, agar pemanfaatannya tepat sasaran dan dirasakan merata oleh rakyat Indonesia.

RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I



Penuhi Aspirasi Masyarakat

Rofik Hananto Gelar Lomba Mewarnai dan Memanah



Purbalingga (15/02) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menggelar lomba menggambar dan mewarnai untuk anak usia TK dan SD. Lomba digelar di Rumah Berdaya, Blater, Kalimantan, Minggu (12/02/2023).

Di tempat yang sama, anggota Komisi VII DPR RI itu juga menggelar lomba memanah Rofik Cup Archery Tournament. Turnamen diikuti peserta dari berbagai kota kategori usia SD, SMP, SMA dan umum.

"Kegiatan ini dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dari para pekerja seni yang mengusulkan dibuat educenter wisata atau wisata yang ada sifat edukasinya," kata Rofik.

Dia menambahkan, educenter ini perlu karena sudah semakin banyak TK yang datang ke Rumah Berdaya. Selama ini kalau ke Rumah Berdaya cuma melihat kuda. Sehingga dirasa kalau hanya melihat kuda kurang lengkap.

"Pak Dwi dan Bu Ani dan tim Blarak Pak Agus mengusulkan dibuat sanggar seni atau apa sebagai pusat edukasi anak maka langsung dibuat RH Kids Edu Center. Di ERHA Kids Edu Center salah satu yang dikembangkan dan langsung digelar adalah lomba mewarnai dan menggambar," kata Rofik.

Sementara itu Rofik juga

melakukan peresmian lapangan memanah sekaligus membuat turnamen sederhana yaitu Rofik Cup Archery Tournament.

"Saya melihat animo masyarakat terhadap olah raga memanah sangat besar sekali. Kita cuma menginformasikan secara terbatas pada 3-4 hari, yang mendaftar langsung penuh. Mungkin karena cabor ini asli dari Indonesia. Jadi masyarakat sudah mafhum. dan juga tahu bahwa cabor ini mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas

"Saya melihat animo masyarakat terhadap olah raga memanah sangat besar sekali.

Kita cuma menginformasikan secara terbatas pada 3-4 hari, yang mendaftar langsung penuh. Mungkin karena cabor ini asli dari Indonesia. Jadi masyarakat sudah mafhum. dan juga tahu bahwa cabor ini mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas internasional,"

internasional," tuturnya.

Dia menjelaskan, lapangan memanah ini juga sebagai pelengkap pelatihan mengendarai kuda Erha Stable yang sudah ada sebelumnya. "Jadi di sini nanti jadi pusatnya edukasi dan olahraga," katanya.

Rofik mengatakan, pihaknya membuka pendaftaran Erha Archery Club dan yang mendaftar langsung banyak. Apalagi mereka tahu pelatih klub memanah ini adalah pelatih memanah nasional.

"Kabarnya nanti di sini juga akan dijadikan salah satu lokasi Popda untuk cabor memanah. Karena lapangan memanah di sini yang representatif. Nanti kita siapkan pelatihan memanah yang bisa menunjang prestasi atlet," katanya.

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII



Diah Nurwitasari Kunjungi Para Aktivis Sosial Kemasyarakatan di Dapil

Bandung (13/02) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jabar II, Diah Nurwitasari, bertemu dengan beberapa aktivis sosial kemasyarakatan, kader Posyandu dan konselor keluarga di Kabupaten Bandung.

Pertemuan ini dilatarbelakangi dengan munculnya banyak pemberitaan tentang berbagai permasalahan keluarga di media sosial maupun media cetak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, eksploitasi anak dan lain sebagainya, yang seolah menjadi tontonan lumrah yang kita konsumsi sehari-hari.

"Maksud kami bersilaturahmi ini, karena makin maraknya kasus-kasus permasalahan keluarga yang muncul di pemberitaan media. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah yang lebih besar jika tidak segera dicari solusinya." Aleg perempuan asal Bandung ini membuka pembicaraan.

"Sudah saatnya kita berkolaborasi dan bersinergi untuk mengambil langkah strategis dan taktis untuk mencoba memperbaiki kondisi ini." Imbuh Wakil Ketua BPKK DPP PKS yang ternyata adalah salah satu tokoh yang menginisiasi lahirnya Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) ketika dirinya masih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan inipun diisi dengan diskusi hangat tentang berbagai hal mengenai problematika kehidupan di masyarakat yang sering ditemui para aktivis sosial kemasyarakatan dan kader Posyandu ini.

"Semoga ke depannya kita bisa sering berkordinasi, karena para ibu memiliki konsen yang sama dengan kami di BPKK PKS yang bericita-cita menghadirkan keluarga-keluarga kuat demi Indonesia yang hebat." Diah menyampaikan harapannya sebelum berpamitan.

"Maksud kami bersilaturahmi ini, karena makin maraknya kasus-kasus permasalahan keluarga yang muncul di pemberitaan media. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah yang lebih besar jika tidak segera dicari solusinya."

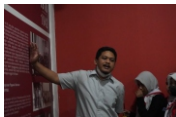
Dipl.Ing. Hj. **DIAH
NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II





Terima Kunjungan Pelajar Maluku,

Aleg PKS: Semangat Belajar untuk Jadi Pemimpin Masa Depan!



Dalam kesempatan ini, Saadiah mengajak para siswa/i untuk giat belajar guna menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. "Mari kita tumbuhkan semangat belajar sejak dini. Dengan giat belajar, adik-adik akan menjadi pintar sehingga dapat memberikan karya terbaiknya bagi bangsa dan negara", ujar Saadiah.

Jakarta (13/02) — Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menerima kunjungan belajar dari Yayasan Pendidikan As-Salam, Maluku, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/02).

Dalam kesempatan ini, Saadiah mengajak para siswa/i untuk giat belajar guna menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. "Mari kita tumbuhkan

semangat belajar sejak dini. Dengan giat belajar, adik-adik akan menjadi pintar sehingga dapat memberikan karya terbaiknya bagi bangsa dan negara", ujar Saadiah.

Anggota Komisi IV DPR RI ini pun mengapresiasi kehadiran siswa/i yang datang

dari Maluku ke Jakarta untuk mengenal lebih jauh DPR RI.

"Saya sangat senang dan bangga kepada adik-adik karena punya rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki perhatian yang besar pada lembaga-lembaga negara, termasuk DPR. Semoga adik-adik semua menjadi pemimpin masa depan yang menggantikan posisi kami sebagai anggota DPR dan pejabat publik lainnya. Semangat terus untuk belajar!", pungkas Saadiah.

Adapun, dalam kunjungan ini, Saadiah mengajak para siswa/i Yayasan As-Salam, Maluku, ke Ruang Paripurna DPR RI, Museum DPR RI, dan Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI.

"Saya sangat senang dan bangga kepada adik-adik karena punya rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki perhatian yang besar pada lembaga-lembaga negara, termasuk DPR. Semoga adik-adik semua menjadi pemimpin masa depan yang menggantikan posisi kami sebagai anggota DPR dan pejabat publik lainnya. Semangat terus untuk belajar!";

SAADIAH ULUPUTTY, S.T
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T |

Terima Kunjungan dari BPKK DPW PKS Jawa Barat

Jakarta (13/02) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifah Amaliah, menerima kunjungan dari tokoh dan pegiat sosial perempuan yang tergabung dalam Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Jawa Barat di Ruang Meeting Fraksi PKS di Gedung Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/02).

Dalam pertemuan tersebut, Ledia memberikan apresiasi kepada para hadirin yang datang terkait kontribusi mereka dalam aktivitas sosial dan pendidikan keluarga di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu sekalian yang telah berkontribusi aktif dalam memberikan pelayanan sosial, mengadvokasi kepentingan masyarakat, dan memperjuangkan ketahanan keluarga, khususnya di Provinsi Jawa Barat", ungkap Ledia.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini pun meminta agar para

pegiat perempuan di BPKK ikut terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Saat ini, PKS memiliki 50 kursi di parlemen. Kita berharap kerja-kerja politik pemberdayaan dari ibu-ibu semua, yang turun langsung ke masyarakat, dapat terkonversi

menjadi suara bagi PKS di 2024 sehingga jumlah kursi kita bertambah", ujarnya lagi.

Ledia pun meminta agar para perempuan PKS mampu menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya soal isi pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga.

"Kader-kader BPKK PKS harus memiliki peran dalam mendorong kemandirian ekonomi ibu-ibu di sekitarnya, termasuk menjadi teladan dan aktif memberikan edukasi soal ketahanan keluarga", pungkasnya.

Selain Ledia Hanifa, pertemuan ini juga dihadiri Anggota Fraksi PKS DPR RI dari Dapil Jawa Barat lainnya, yakni Diah Nurwitasari dan Netty Prasetyani.



"Kader-kader BPKK PKS harus memiliki peran dalam mendorong kemandirian ekonomi ibu-ibu di sekitarnya, termasuk menjadi teladan dan aktif memberikan edukasi soal ketahanan keluarga",

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I



Terima Masukan Apoteker
soal RUU Kesehatan

Baleg FPKS: Kami Akan Kawal Aspirasinya!



Jakarta (13/02) -- Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, menerima aspirasi dari para apoteker guna membahas soal sejumlah pasal dalam RUU Kesehatan di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/02).

Dalam pertemuan ini, Hermanto menegaskan kembali posisi Fraksi PKS yang menolak RUU Kesehatan.

"Beberapa hari lalu, Fraksi PKS melalui Ibu Ledia Hanifa telah menyatakan bahwa kami menolak RUU tentang Kesehatan untuk menjadi usul inisiatif DPR. Namun, karena hanya PKS yang menolak, Badan Legislasi tetap melanjutkan proses pembahasan RUU ini", ujar Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Hermanto menyebut bahwa Fraksi PKS akan terus mengawal setiap pasal yang ada dalam RUU Kesehatan.

"Karena ini prosesnya berlanjut, maka kami tentu akan mengawal proses pembahasannya. Termasuk, pada kesempatan ini, kami menerima aspirasi dari Bapak/Ibu apoteker, untuk nantinya kita perjuangkan bersama di DPR RI", ungkap Hermanto.

Terakhir, ia meminta dukungan kepada para apoteker dan profesi tenaga kesehatan lain kepada Fraksi

PKS agar dapat memberikan produk hukum yang terbaik bagi terbentuknya sistem kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

Kami berharap agar bapak/ibu senantiasa memberikan masukan-masukan berharga kepada Fraksi PKS selama RUU ini diproses di DPR. Hal ini sangat penting agar kami dapat merumuskan kebijakan terbaik bagi seluruh pihak yang terkait di RUU Kesehatan ini", pungkask Hermanto.

Sebagai informasi, para apoteker yang hadir meminta agar sejumlah pasal dalam draft RUU Kesehatan disesuaikan kembali. Salah satunya ialah mengganti nomenklatur 'kefarmasian' atau 'farmasi' menjadi 'profesi apoteker'.

"Kami berharap agar bapak/ibu senantiasa memberikan masukan-masukan berharga kepada Fraksi PKS selama RUU ini diproses di DPR. Hal ini sangat penting agar kami dapat merumuskan kebijakan terbaik bagi seluruh pihak yang terkait di RUU Kesehatan ini",

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Badan Legislasi DPR RI



Terima Kunjungan Mahasiswa Ubaja, Jazuli: Iman dan Ilmu Kunci Kesuksesan!



Jakarta (14/02) - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menerima kunjungan rektor dan mahasiswa dari Universitas Banten Jaya bertempat di ruang pertemuan Fraksi PKS DPR RI di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta (14/02).

Fraksi PKS merupakan satu-satunya fraksi di DPR RI yang membuat dua hari khusus dalam satu minggu. Dua hari ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan kegelisahannya terkait dengan berbagai permasalahan yang dialami, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"PKS ingin merubah pandangan masyarakat terhadap wakil rakyat di DPR RI bahwa anggota DPR dapat dengan mudah menerima kunjungan atau aspirasi dari rakyat dengan cara membuat hari khusus aspirasi setiap dua hari dalam satu minggu," ujar Jazuli.

Kemudian, beliau menyampaikan Fraksi PKS memberikan perhatian yang amat besar terhadap dunia pendidikan. Pendidikan menjadi pondasi dasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Dengan memiliki sistem pendidikan yang baik,

maka akan berimplikasi kepada hasil dari pendidikan itu yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Allah mengangkat derajat seseorang bukan terkait dengan keturunan, walaupun kita merupakan keturunan orang terpendang di dunia ini tetap saja pendidikan merupakan suatu kewajiban yang perlu ditekuni selama hidup agar derajat hidup akan terangkat," ujar beliau.

Derajat seseorang dapat Allah SWT angkat dengan dua hal, iman dan ilmu. Jangan sampai para mahasiswa melupakan dua hal yang menjadi kunci tersebut.

Tentunya, para Mahasiswa harus terus belajar dengan serius dan menghormati para dosennya agar ilmu tersebut menjadi berkah.

"Jika Indonesia ingin menjadi negara yang makmur, tentunya bidang pendidikan haruslah diberikan perhatian yang lebih. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia," pungkasnya.

Akhir kata, Jazuli Juwaini berharap para Mahasiswa Universitas Banten Jaya untuk dapat terus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, khususnya masyarakat di daerah Banten. Oleh karena itu para mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan dan juga kepekaan terhadap permasalahan yang diderita oleh rakyat.

"Jika Indonesia ingin menjadi negara yang makmur, tentunya bidang pendidikan haruslah diberikan perhatian yang lebih. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia,"

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Kunjungan DPD PKS Sukabumi, Slamet: Kita Harus Peduli Politik!

Slamet menyerukan agar dibantu untuk menyampaikan ke masyarakat terkait pentingnya terlibat dalam politik. Menurutnya, masyarakat lah yang akan sengsara jika tidak ada keterlibatan dalam pembuatan kebijakan.

Jakarta (14/02) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Slamet menerima aspirasi dari Badan Pembinaan Cabang DPD PKS Kabupaten Sukabumi di Ruang Meeting Fraksi PKS di Gedung Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/02).

Slamet menyerukan agar dibantu untuk menyampaikan ke masyarakat terkait pentingnya terlibat dalam politik. Menurutnya, masyarakat lah yang akan sengsara jika tidak ada keterlibatan dalam pembuatan kebijakan.

"Sampaikan kepada masyarakat bahwa keterlibatan dalam dunia politik merupakan

suatu keharusan bagi setiap warga khususnya umat islam. Karena dengan adanya keputusan politik kita bisa memiliki nasib yang sengsara," ujar Anggota DPR RI Komisi IV ini.

Bukti-bukti kembali disertakan oleh Slamet, terkait pentingnya keterlibatan pada politik. Isu seperti harga minyak yang naik, biaya haji, merupakan bukti nyata pentingnya keterlibatan politik

masyarakat.

"Kebijakan politiklah yang membuat biaya haji naik, harga minyak naik. Hal-hal yang menyangkut masyarakat inilah yang membuat keterlibatan dalam politik ini penting," ujar Slamet.

Sekali lagi, Slamet berpesan agar DPC dapat dimanajemen dengan baik. Dan fokus utama untuk selalu mengajak agar masyarakat peduli dan terlibat dalam politik.

"Pesan saya, manajemen harus diatur dengan baik. Tidak usah khawatir untuk pemilu nanti. Berjuang sebaik-baiknya. Sampaikan agar masyarakat peduli dengan politik. Kita harus mengajak masyarakat agar selalu peduli dan terlibat dalam politik."



“Pesan saya, manajemen harus diatur dengan baik. Tidak usah khawatir untuk pemilu nanti. Berjuang sebaik-baiknya. Sampaikan agar masyarakat peduli dengan politik. Kita harus mengajak masyarakat agar selalu peduli dan terlibat dalam politik.”

drh. H. SLAMET
Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Jawa Barat IV

Raih Penghargaan Top Legislator Award & Senator Award 2023 For Personal Branding

Nevi Zuairina: Semoga Jadi Inspirasi untuk Berjuang bagi Bangsa

Jakarta (04/02) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina kembali mendapat Penghargaan Top Legislator Award & Top Senator Award 2023 For Personal Branding di tahun 2023 ini. Ajang Penghargaan ini digelar oleh SuaraPemerintah.ID dan TRAS N CO Indonesia di Jakarta.

"Saya Nevi Zuairina, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada SuaraPemerintah.ID dan TRAS N CO Indonesia yang telah memberikan penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding tahun 2023," tutur Nevi.

Nevi mengatakan, bahwa Penghargaan ini merupakan penghargaan kali kedua yang ia terima. Dan pendapatnya, penghargaan ini sangat menginspirasi dirinya untuk

terus berjuang secara ikhlas mendedikasikan diri bagi bangsa dan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para pelaku UMKM dan memajukan perekonomian bangsa dalam skala nasional.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mempersembahkan penghargaan ini bagi Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh konstituen serta rakyat Indonesia.

"Mari kita seluruh komponen bangsa untuk "Gadang Basamo", besar bersama-sama,

sejahtera bersama-sama, makmur bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ajak Nevi.

Politisi PKS ini merupakan Sosok perempuan yang lahir di Jakarta, 20 September 1965, saat ini hadir bagaikan mewakili "the power of emak-emak" di gedung dewan. Betapa tidak, saat mendampingi suaminya yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat dua periode (2011-2015 dan 2016-2021), ia aktif menjabat Ketua TP PKK Sumatera Barat.

Mengikuti jejak suaminya, ia pun akhirnya terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi legislator PKS pada Pemilu Legislatif 2019 di Dapil Sumbar II. Sebagai anggota Komisi VI, sikapnya yang kritis dalam berbagai sidang dewan terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat sebagai komitmennya kepada bangsa

dan negara.

Berdasarkan hasil penilaian TOP LEGISLATOR AWARD FOR PERSONAL BRANDING 2023, ada lebih dari 4,5 ribu ulasan halaman internet dan 1.000 lebih pemberitaan tentang Hj. Nevi Zuairina dalam kurun waktu 1

tahun terakhir.

"Sekali lagi saya mengucapkan, Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, terima kasih atas penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 ini," tutup Nevi Zuairina dalam moment penerimaan penghargaan.



"Mari kita seluruh komponen bangsa untuk "Gadang Basamo", besar bersama-sama, sejahtera bersama-sama, makmur bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

**RAKERNAS**

Menantang dan Bersamaan dengan Rakyat

Pidato Apel Siaga, Pemenangan Anies: PKS Menang Bersama Rakyat!

Jakarta (26/02) - Anies Baswedan, Bakal Calon Presiden Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera menyemangati seluruh simpatisan Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa berjuang sampai mendapatkan kemenangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam kegiatan Apel Siaga PKS #MenangBersamaRakyat, di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Minggu (26/02).

Dengan diusung oleh PKS, Anies menyampaikan perjuangan dimulai kembali bersama-sama dengan PKS untuk kepentingan bangsa.

"PKS kembali mengibarkan kembali perjuangan untuk bersama-sama memperbaiki dan memperjuangkan bangsa yang kita cintai," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Anies menyampaikan pentingnya tiga hal untuk mencapai kemenangan.

"Kemenangan tentang kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Kini saatnya kita melangkah ke jenjang berikutnya," ungkap bakal calon presiden Republik Indonesia ini.

Anies menyatakan rekam jejak menjadi hal yang penting. Tidak perlu takut karena rekam jejak PKS dan Anies sudah sangatlah baik dalam memperjuangkan rakyat.

"Bila ingin melihat apa yang ingin dilakukan seseorang

ke depan. Lihatlah rekam jejaknya, karena rekam jejak adalah prediktor masa depan. Dalam kerja ke depan, tidak perlu membuat hoax dan tidak perlu menyerang lawan. Karena kita percaya diri dengan rekam jejak, rekam wawasan, dan rekam program," ujar Anies.

Sebagai bangsa yang beragam, Anies memaparkan istimewanya kita dibanding negara lain yang memiliki keragaman juga, yaitu adanya persatuan yang mengikat.

"Politik kita adalah politik keadilan dan persatuan. Keistimewaan Indonesia sangatlah beragam, tetapi masih banyak bangsa dan negara lain yang lebih beragam. Yang lebih istimewa dari Indonesia adalah adanya persatuan dari bangsa-bangsa tersebut."

Anies menutup dengan tegas, PKS dan Anies akan terus memperjuangkan keadilan, demi seluruh rakyat Indonesia.

"Keadilan adalah mimpi setiap insan, bersama PKS bergandengan tangan, menang bersama rakyat dan tuntaskan tujuan," tutup Anies.

"Bila ingin melihat apa yang ingin dilakukan seseorang ke depan. Lihatlah rekam jejaknya, karena rekam jejak adalah prediktor masa depan. Dalam kerja ke depan, tidak perlu membuat hoax dan tidak perlu menyerang lawan. Karena kita percaya diri dengan rekam jejak, rekam wawasan, dan rekam program,"

ANIES BASWEDAN

Bakal Calon Presiden 2024 - 2029

**RAKERNAS**
Rapat Kerja Nasional
Membahas dan Menetapkan Kebijakan

Ribuan Peserta Ikuti Apel Siaga Pemenangan PKS di Senayan

Jakarta (26/02) --- Ribuan peserta yang berasal dari seluruh Indonesia mengikuti Apel Siaga Pemenangan PKS #MenangBersamaRakyat di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, (26/2).

Peserta apel terdiri dari Tim Kepanduan PKS Jabodetabek, peserta Rakernas PKS, dan kader PKS se Jakarta berjumlah lebih dari lima ribu peserta.

Hadir pula Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diukung PKS Anies Rasyid Baswedan yang masuk ke lapangan menaiki mobil komando bersama Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Ahmad Syaikh, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri memberikan amanat upacara dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Pemenangan PKS dan Anies Baswedan yang dipimpin oleh Presiden PKS

Ahmad Syaikh dan diikuti oleh ribuan peserta apel.

"Kami segenap pimpinan, struktur partai, anggota, dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera meneguhkan niat, menyatukan tujuan, menyatakan ikrar pemenangan menghadapi pemilu 2024," tutur Syaikh.

Apel siaga ini kemudian dilanjutkan dengan senam bersama Go PKS Go dan PKS 8 yang dipimpin oleh Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Defrizal Siregar dan dimeriahkan oleh Komunitas Senam Nasional.

Acara turut diramalkan dengan penampilan Marching Band, Penyanyi Hendra X Factor, dan belasan Bazar UMKM yang menjual berbagai prc

Kami segenap pimpinan, struktur partai, anggota, dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera meneguhkan niat, menyatukan tujuan, menyatakan ikrar pemenangan menghadapi pemilu 2024

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS

**RAKERNAS**

24-25 Februari 2023

JALAN Keadilan Sejahtera, Jakarta

Ketua Majelis Syura PKS Buka Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024

Jakarta (26/02) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024 #MenangBersamaRakyat di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/2/2023) pagi.

Acara tersebut dihadiri lebih dari lima ribu anggota dan simpatisan PKS yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, serta peserta Rakernas PKS 2023 dari seluruh penjuru tanah air.

Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf Al Jufri membuka Apel Siaga. Di hadapan ribuan kader PKS yang berbaris dengan sikap sempurna, Salim menyebut Apel Siaga bukti PKS menginginkan perubahan.

"Hari ini kita telah membuktikan bahwa perbedaan suku, agama bukanlah salah satu sumber perpecahan, bahkan untuk

menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, kita berkumpul disini membawa energi perubahan untuk negeri kita tercinta," ucap Salim.

Sebelum resmi membuka Apel Siaga Pemenangan PKS, Dr. Salim terlebih dahulu berkeliling melakukan inspeksi barisan dengan mobil komando. Bakal calon presiden yang diusung PKS, Anies Rasyid Baswedan ikut serta dalam kegiatan ini.

Anies terlihat mengenakan jaket oranye dengan rompi berwarna biru dan topi. Turut mendampingi Presiden PKS Ahmad Syaikh, dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Hari ini kita telah membuktikan bahwa perbedaan suku, agama bukanlah salah satu sumber perpecahan, bahkan untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, kita berkumpul disini membawa energi perubahan untuk negeri kita tercinta

Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS



Presiden PKS: Menang Pemilu 2024, PKS akan Lakukan Prinsip Perubahan dan Keberlanjutan

Jakarta (25/02) --- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhulillah menegaskan, partainya akan melakukan prinsip perubahan dan keberlanjutan jika menang pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan dalam pidato politik pada hari kedua Rakernas PKS, Sabtu (25/2/2023).

"Jika ada masyarakat yang bertanya, apa yang akan dilakukan oleh PKS jika diberi amanah untuk memimpin? Insya Allah kita akan membangun Indonesia dengan prinsip Perubahan dan Keberlanjutan," kata Syaikhulillah.

Syaikhulillah menyebut keberhasilan pembangunan pemerintah sebelumnya akan dilanjutkan dengan diiringi inovasi pada aspek lain.

"Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemudian dilengkapi dengan melakukan inovasi pembangunan pada aspek-aspek lainnya yang belum optimal," imbuh Syaikhulillah.

Syaikhulillah kemudian menyampaikan peran dari para presiden Indonesia sebelumnya yang telah melakukan kesinambungan pembangunan dari masa ke masa.

"Bung Karno telah mewariskan pembentukan

"nation and character building" untuk mempersatukan bangsa yang beragam, Presiden Soeharto mewariskan pembangunan yang berkelanjutan, Presiden Habibie menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi," tutur Syaikhulillah.

"Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi, Presiden Megawati menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri ini, Presiden SBY mampu

menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi, Presiden Jokowi telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ke berbagai pelosok negeri," lanjutnya.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga menerangkan, setiap pemimpin memiliki masa dan tantangan tersendiri. Dan PKS mempercayakan amanah kepemimpinan kepada sosok Anies Baswedan.

"PKS insya Allah mempercayakan sosok yang mampu mewujudkan hal tersebut untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya kepada Saudara Anies Rasyid Baswedan. Kita percaya beliau memiliki kapasitas untuk menyatakan seluruh elemen bangsa," pungkasnya.

"Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemudian dilengkapi dengan melakukan inovasi pembangunan pada aspek-aspek lainnya yang belum optimal,"

H. AHMAD SYAIKHULILLAH
Presiden PKS



Pergi berjalan ke Tanjung Pinang
Berhenti sebentar memakan duren
2024 InsyaAllah PKS Menang
Anies Baswedan Insya Allah
menjadi Presiden

PKS *Menang*
Anies *Presiden*

**RAKERNAS**
24-26 Februari 2023
MELAKSANAKAN STRATEGI KEMENANGAN

Buka Rakernas 2023, Dr Salim: Kemenangan PKS Kemenangan Rakyat Indonesia

Dalam pidatonya, Dr. Salim menyebut tekad PKS untuk memenangkan Pemilu 2024 tidak semata untuk kemenangan internal. Melainkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan tema rakernas yakni Menang Bersama Rakyat.

Jakarta (24/02) — Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al Jufri menyampaikan Pidato Kebangsaan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Dalam pidatonya, Dr. Salim menyebut tekad PKS untuk memenangkan Pemilu 2024 tidak semata untuk kemenangan internal. Melainkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sesuai dengan tema rakernas yakni Menang Bersama Rakyat.

"Tema Rakernas kali ini cukup menarik dan membuat kita bangga: Menang Bersama Rakyat, pesannya sangat jelas bahwa kemenangan PKS adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Dr. Salim menyebut, hal itu perlu ditegaskan agar tujuan untuk meraih kemenangan tidak kehilangan orientasi.

"Penegasan ini penting sekali agar kita tidak kehilangan orientasi, bahwa kemenangan

kita semata-mata untuk untuk menyebarluaskan risalah kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Dr. Salim.

Lebih lanjut, semangat pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memperkokoh visi PKS sebagai partai Islam yang rahmatan lil'alamin.

"Tingkatkan pelayanan kepada rakyat karena visi kita,

menjadi partai Islam yang rahmatan lil'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat," tutur Dr. Salim

"Kita harus terus beramal karena amal ini akan dilihat Allah, dilihat Rasul dan mereka-mereka yang beriman, tidak ada sesuatu yang hilang dalam kebaikan tersebut karena kita tidak tahu amalan apa yang akan membuat kita masuk surga," pungkasnya.

Rakernas PKS berlangsung dari 24-26 Februari 2023. Dalam pembukaan acara tersebut, hadir pimpinan PKS dari tingkat pusat wilayah hingga daerah, turut hadir Bakal Calon Presiden yang diusung oleh PKS Anies Baswedan.

Semangat pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memperkokoh visi PKS sebagai partai Islam yang rahmatan lil'alamin.

Tingkatkan pelayanan kepada rakyat karena visi kita, menjadi partai Islam yang rahmatan lil'alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat

Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS

**RAKERNAS**
24-25 Februari 2023
MENANAN BERKEMAJUAN MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

Rakernas PKS, Anies Baswedan: Kita Berjalan Bersama Hadirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Anies menyebut, hasil Musyawarah Majelis Syura PKS ke VIII menjadi landasan dirinya berjalan bersama PKS dalam menghadapi Pemilu mendatang.

Jakarta (24/02) — Bakal Calon Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anies Baswedan menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Mengenakan jas dan peci hitam, Anies memasuki ruang rakernas didampingi Presiden PKS Ahmad Syaikh.

Anies menyebut, hasil Musyawarah Majelis Syura PKS ke VIII menjadi landasan dirinya berjalan bersama PKS dalam menghadapi Pemilu mendatang.

"Rakernas ini menjadi bekal untuk melaksanakan keputusan dari Majelis Syura dan insya Allah kita akan berjalan bersama-sama,"

Kebersamaan dengan PKS, sebut Anies akan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

"Kami berkeliling Indonesia dan kami mendengar aspirasi masyarakat. Kami merasakan adanya keinginan yang kemudian kami tulis dalam sebuah kalimat, yakni keinginan untuk meluruskan jalan

menghadirkan keadilan rakyat, mendambakan demokrasi dan hukum yang memorsatukan kepentingan mereka bukan kepentingan yang lain," tutur Anies.

"Kita berniat untuk bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan dengan kesetaraan niat itu

telah diungkapkan," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu lantas menyebut, Rakernas PKS membawa energi perubahan ke seluruh Indonesia.

"Perjalanan yang amat penting dalam satu tahun ke depan untuk meraih kemenangan kemarin kita semua merasakan suasana yang luar biasa perubahan energi perubahan keinginan perbaikan memancar dari kantor DPP PKS dan menyebar ke seluruh Indonesia dan energi itu nampaknya semakin besar pada Rakernas kali ini," tutup Anies.

"Kami berkeliling Indonesia dan kami mendengar aspirasi masyarakat. Kami merasakan adanya keinginan yang kemudian kami tulis dalam sebuah kalimat, yakni keinginan untuk meluruskan jalan menghadirkan keadilan rakyat, mendambakan demokrasi dan hukum yang memorsatukan kepentingan mereka bukan kepentingan yang lain,"

ANIES BASWEDAN

Bakal Calon Presiden 2024 - 2029

**RAKERNAS**
24-26 Februari 2023
MILESTONE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Sekjen PKS Tegaskan Rakernas Jadi 'Milestone' Kemenangan 2024

Jakarta (24/02) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 yang diikuti oleh jajaran Majelis Syura, Dewan Syariah Pusat, Majelis Pertimbangan Partai, Pimpinan DPP, Ketua Badan dan Bidang, Fraksi PKS DPR RI, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, serta pimpinan DPW dan DPD dari seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboebakar Alhabsy mewakili panitia Rakernas 2023 menyampaikan laporan kegiatan yang berlangsung mulai dari Jumat hingga Ahad mendatang, (24-26/2/2023).

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini menyebut Rakernas yang diikuti 1115 peserta ini sangat istimewa, karena digelar setahun menjelang Pemilu dan menjadi bagian milestone kemenangan PKS di 2024.

"Oleh karena itu Rakernas menjadi bagian milestone untuk menuju kemenangan PKS di 2024," ujarnya.

Habib Aboe berharap konten dan sambutan para pimpinan di Rakernas dapat meningkatkan semangat peserta yang nantinya akan disebarkan ke pengurus di daerahnya masing-masing.

"Semoga konten acara kita dan sambutan pimpinan-

pimpinan PKS akan lebih menggairahkan ketika pulang ke kampung halaman," harap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Pada acara Rakernas ini, akan diluncurkan Nomor 8 nomor urut PKS. Aboe berharap ini menjadi pendorong untuk

terus mensosialisasikan nomor dan lambang baru PKS ke masyarakat.

"Hari ini sebagai dorongan untuk seluruh kader dan struktur untuk kembali mensosialisasikan lambang dan nomor ke masyarakat," sambungnya.

Kegiatan Rakernas akan diakhiri dengan Apel Siaga Pemenangan PKS di Stadion Madya, Gelora Bung Karno yang diikuti ribuan peserta dari peserta Rakernas, Tim Kepanduan Jabodetabek, serta Anggota PKS se Jakarta.

"Apel siaga ini diharapkan akan mampu memberikan dorongan semangat kesiapan kemenangan 2024."

Hari ini sebagai dorongan untuk seluruh kader dan struktur untuk kembali mensosialisasikan lambang dan nomor ke masyarakat

**HABIB ABOE BAKAR
ALHABSYI**

Sekjen DPP PKS

RAKERNAS

24-26 Februari 2023

MENANG BERSAMA RAKYAT

8
PKS



Kita berhimpun membawa Energi untuk Perubahan

"Hari ini kita telah membuktikan bahwa perbedaan suku, agama bukanlah salah satu sumber perpecahan, bahkan untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, kita berkumpul disini membawa energi perubahan untuk negeri kita tercinta,"

Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS

Disampaikan dalam Apel Siaga Pemenangan Pemilu 2024



Tutup Kemnas V Pramuka SIT **HNW: Agar Sebarkan Kecintaan pada Bangsa dan Negara**



Jakarta (19/02) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, yang diundang sebagai inspektur upacara menutup secara resmi Kemah Ukhuwah Nasional (Kemnas) V Satuan Komunitas Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) 2023 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (18/2/2023).

Hidayat merasa bersyukur dan bangga dengan penyelenggaraan Kemnas V Sako Pramuka SIT sebagai hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Satuan Komunitas Pramuka Jaringan Sekolah Islam Terpadu.

"Sebagai pimpinan lembaga negara MPR, dan sebagai insan yang dari dahulu sangat mencintai pramuka, saya bersyukur dan berbangga hati atas kerjasama yang luar biasa, Kwarnas dan satuan komunitas pramuka jaringan sekolah islam terpadu yang sudah terlaksana dengan yang terbaik. Ini adalah salah satu kolaborasi yang sangat perlu didukung, dirawat dan dikembangkan. Jiwa pramuka memang jiwa kebersamaan, kejuangan, ketulusan dan cinta kebangsaan, bahkan kemah ukhuwah itu juga menghadirkan pramuka-pramuka dari Malaysia dan Thailand," kata Hidayat Nur

Wahid usai menutup secara resmi Kemnas V Satuan Komunitas Pramuka SIT.

Hadir pada penutupan Kemnas V Satuan Komunitas Pramuka SIT 2023 ini antara lain Waka Kwarnas/Ketua Komisi Saja Sako Gugus Darma, Kak Yuniar Ludfi, Waka Kwarnas/Ketua Komisi Binawas Kak Joko Mursitho, Pimpinan Kwarnas yang sekaligus Dewan Pembina Jaringan Sekolah Islam Terpadu Dr. Sukro Muhab, Ketua Umum JIST Fahmi Zulkarnain, M.Pd, dan lain2, serta pimpinan

delegasi Pramuka dari Malaysia.

Satuan komunitas (Sako) Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) mengadakan kegiatan Kemah Ukhuwah Nasional (Kemnas) V 2023 di Buperta Cibubur Jakarta Timur. Acara Kemnas V bertema 'Membentuk generasi kreatif, inovatif, dan kolaboratif, dan berlangsung mulai pada 15-18 Februari 2023.

Kemnas V diikuti sebanyak 9.433 orang peserta putra dan putri, dari 32 provinsi, serta peserta dari luar negeri, yaitu Malaysia dan Thailand.

Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara, HNW juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Kemnas ini merupakan satu modal penting yang harus terus dijaga dan didukung serta dikembangkan sehingga pramuka termasuk khususnya satuan komunitas pramuka jaringan sekolah islam terpadu menjadi bagian dari yang

BERIKUTNYA >>>

Hidayat merasa bersyukur dan bangga dengan penyelenggaraan Kemnas V Sako Pramuka SIT sebagai hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Satuan Komunitas Pramuka Jaringan Sekolah Islam Terpadu.



Tutup Kemnas V Pramuka SIT ...

◀ SEBELUMNYA

memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kemajuan pramuka, bagi kebanggaan pramuka, yang diterima dan dihargai masyarakat internasional.

HNW berharap Kemnas ini bisa berlanjut pada Kemnas selanjutnya dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan diikuti oleh 38/semua provinsi di Indonesia. Bahkan, bila Kemnas V ini diikuti pramuka dari dua negara sahabat, yaitu Malaysia dan Thailand, maka diharapkan ke depan Kemnas bisa melibatkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

"Ini tidak mustahil bisa tercapai melihat persiapan, kegiatan, aksi, kebersamaan, dan profesionalitas pada Kemnas V ini. Untuk itu apresiasi yang tinggi kepada panitia dan peserta Kemnas V," ujarnya.

Dalam amanatnya di depan ribuan peserta Kemnas V, HNW juga menceritakan pentingnya kepercayaan diri Pramuka satuan komunitas Sekolah Islam Terpadu untuk maksimal berkiprah mencintai bangsa dan negara, karena

itulah yang telah diwariskan dan diteladankan oleh Tokoh pencipta Hymne Pramuka, lagu perjuangan Syukur dan Hari Merdeka, beliau juga penggagas Paskibraka, beliau seorang habib, bernama H. Mutahar.

"Beliau adalah seorang habaib. Nama lengkapnya adalah Mohammad bin Husein Al Mutahar. Beliau sangat mencintai agamanya yaitu al Islam, justru karena cinta agamanya beliau sekaligus cinta dengan negara dan bangsanya. Beliau bahkan menjadi kepercayaan Presiden Bung Karno untuk antara lain menyelamatkan sang saka Merah Putih," papar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Pada saat agresi militer kedua Belanda tahun 1949, Belanda menguasai ibu kota negara Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakilnya Bung Hatta ditawan Belanda. Bung Karno memberi tugas orang kepercayaannya Habib Husein Al Mutahar untuk menyelamatkan bendera sang saka Merah Putih.

"Beliau melaksanakan kepercayaan dari Bung Karno dengan sempurna, dengan

berani dan secara luar biasa nan cerdas. Sang Saka Bendera Merah Putih yang dijahit ibu Fatmawati Soekarno diurai, bagian merah digulung dan dimasukan dalam kaos kaki. Bagian yang putih juga digulung dan dimasukan dalam kaos kaki. Beliau berhasil mengelabui pemeriksaan dari tentara Belanda, dan menyelamatkan sang saka bendera Merah Putih," sebut Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

Menjadikan Habib alMutahar sebagai contoh dan teladan, HNW menghararkan para pramuka Jaringan Sekolah Islam Terpadu juga makin berani cinta bangsa dan negara, dan maju ke depan menyelamatkan dan memajukan bangsa dan negara.

"Ini yang menjadi semangat Kemnas V. Pramuka SIT tidak hanya memberikan profesionalitas, tetapi juga pengabdian yang penuh dan cinta pada negara dan bangsa Indonesia," katanya.

Karena itu HNW meminta setelah peserta Kemnas V kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarluaskan spirit dan komitmen cinta bangsa dan negara kepada keluarga, teman-teman dan lingkungannya. Para pramuka peserta Kemnas V adalah generasi milenial, generasi z, dan generasi alpha yang akan sampai pada Indonesia Emas 2045. Satu abad yang lalu,

pada 1920an anak-anak muda mempersiapkan Indonesia merdeka dengan sumpah pemudanya, maka seharusnya bila generasi 2020 an melanjutkan peran menyejarah itu untuk menyongsong 100 tahun syukuran Indonesia Merdeka.

"Persiapkan diri untuk memberikan yang terbaik menghadapi dan mengisi Indonesia Emas 2045. Hadirkan komunitas yang betul-betul berukhuwah, ukhuwah antara sesama Sekolah Islam

Terpadu, ukhuwah dengan sekolah-sekolah yang lain, ukhuwah dengan satuan komunitas pramuka yang lain bahkan ukhuwah keumatan dan kebangsaan serta kemanusiaan. Jadikan ini semuanya rajutan yang kuat untuk mempersiapkan hadirnya generasi bangsa yang bisa melanjutkan dengan mengisi kemerdekaan dengan yang terbaik, hingga sampai tahun 2045, dan abad-abad berikutnya," pungkasnya.



“Persiapkan diri untuk memberikan yang terbaik menghadapi dan mengisi Indonesia Emas 2045. Hadirkan komunitas yang betul-betul berukhuwah, ukhuwah antara sesama Sekolah Islam Terpadu

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokrakj Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Soal Kunjungan Dubes AS

Sekjen PKS: Perkuat Hubungan Baik, Saling Hormati Kedaulatan Bangsa



"Kita sebagai tuan rumah welcome atas kunjungan kehormatan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Sing Yong Kim. Tentu ini adalah kehormatan buat PKS dan kita memang sudah terbiasa berdiskusi secara terbuka dengan semua pihak," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Jakarta (16/02) — Anggota DPR RI sekaligus Sekjen DPP PKS Aboebakar Alhabsy menyambut baik kunjungan kehormatan Dubes Amerika Serikat ke kantor DPP PKS, Rabu, (15/02/2023).

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, kunjungan yang dilakukan Dubes AS merupakan sebuah penghargaan bagi PKS.

"Kita sebagai tuan rumah welcome atas kunjungan kehormatan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Sing Yong Kim. Tentu ini adalah kehormatan buat PKS dan kita memang sudah terbiasa berdiskusi secara terbuka dengan semua pihak," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sebagai bangsa yang berdaulat dan demokratis, imbuh Habib Aboe, PKS memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

"PKS selalu menjunjung tinggi perlindungan hak asasi

manusia dan kelompok minoritas serta penegakan hukum yang adil," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan I ini.

"Secara pribadi saya senang dengan pola komunikasi Dubes Kim yang cukup hangat dalam berkomunikasi. Disisi lain, beliau juga sangat terbuka saat

mendiskusikan upaya upaya dalam memajukan demokrasi di kedua negara," lanjut Habib Aboe.

Habib Aboe menambahkan, pihaknya berharap adanya hubungan baik antara kedua negara dengan menghormati kedaulatan masing-masing.

"Apalagi Indonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu. Dan saya melihat, hal ini dipahami dengan baik oleh Dubes Kim," tutup Habib Aboe.

PKS selalu menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan kelompok minoritas serta penegakan hukum yang adil, Secara pribadi saya senang dengan pola komunikasi Dubes Kim yang cukup hangat dalam berkomunikasi. Disisi lain, beliau juga sangat terbuka saat mendiskusikan upaya upaya dalam memajukan demokrasi di kedua negara,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS



Presiden PKS dan Dubes AS Sepakat Jaga Demokrasi dan Junjung Tinggi Hak Asasi Manusia



Jakarta (15/02) --- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut PKS sebagai salah satu pilar demokrasi berkomitmen untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia, hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Dubes AS untuk Indonesia di kantor DPP PKS, Rabu (15/2/2023).

"Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi, sebagaimana visi Pemerintahan AS dibawah Presiden Joe Biden, PKS juga berkomitmen untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang ingin menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar tetap sehat," tutur Syaikhul.

Syaikhul juga menuturkan PKS juga menjunjung kebebasan sipil dan penegakan HAM, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

"PKS juga menjunjung tinggi kebebasan sipil, perlindungan HAM terhadap kelompok minoritas, serta peegakan hukum yang adil dan profesional," ucap Syaikhul.

Selain itu PKS mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan stabilitas politik di kawasan, Syaikhul menyebut agar semua pihak menghormati kedaulatan politik di masing-masing negara.

"Kami mendukung diplomasi pemerintah Indonesia

dalam turut serta menciptakan stabilitas politik di kawasan maupun di level dunia, kami menginginkan agar semua pihak menghormati kedaulatan politik setiap bangsa dalam mengelola bangsanya," ucap Syaikhul.

"Prinsip non intervensi harus kita pegang bersama sebagai norma global dengan

tetap menjaga nilai-nilai demokrasi sebagaimana amanat dalam Piagam PBB," tutup Syaikhul.

Sementara itu Dubes AS untuk Indonesia Sung Y. Kim mengucapkan terima kasih atas sambutan atas sambutan yang diberikan oleh PKS, Kim menyebut negaranya berkomitmen menjaga demokrasi dan menjunjung tinggi HAM.

"Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh partai PKS, kedatangan kami salah satunya ingin menegaskan negara kami berkomitmen terhadap demokrasi di Indonesia dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," ucap Kim.

" Kami mendukung diplomasi pemerintah Indonesia dalam turut serta menciptakan stabilitas politik di kawasan maupun di level dunia, kami menginginkan agar semua pihak menghormati kedaulatan politik setiap bangsa dalam mengelola bangsanya,"

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS



Dubes AS Kunjungi PKS

Aleg PKS: Ada Komitmen Bersama Perkuat Demokrasi dan HAM



Jakarta (15/02) -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu (15/02/2023).

Dalam kunjungan tersebut Dubes AS didampingi penasehat politik kedutaan Kyle Richardson dan Todd Campbell. Dalam kunjungannya Dubes AS membahas komitmen penegakan HAM dan demokrasi di dunia dan khususnya di Indonesia bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhulmuhammad dan jajaran pengurus PKS.

Kunjungan ke partai politik ini merupakan yang pertama bagi Sung Y. Kim semenjak bertugas di Jakarta.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta menyatakan PKS menyambut baik kunjungan Dubes AS. Menurutnya PKS selalu membuka diri untuk menjalin persahabatan dengan semua bangsa dan negara untuk membangun dunia dengan landasan kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Suasana kunjungan, pembicaraan dan diskusi berlangsung hangat, rileks dan terbuka. Ada pandangan yang sama atas beberapa perkembangan dalam dinamika politik dunia saat ini yang dianggap dapat menjadi

ancaman bagi demokrasi dan HAM. Di sisi lain juga ada pemahaman yang sama perlunya membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih erat dalam upaya memperkuat komitmen penegakan demokrasi dan HAM", ungkap Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini.

Selain soal demokrasi dan HAM, juga dibahas upaya untuk menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat di sektor ekonomi dan sektor lainnya.

PKS tentu akan terus

mendorong pemerintah Indonesia memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat dan juga semua negara yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dan HAM. Kemitraan dengan negara maju seperti Amerika Serikat diharapkan bisa memberikan keuntungan tidak hanya di sisi ekonomi tetapi juga terkait iptek dan peningkatan kualitas SDM."

Selain Presiden PKS Ahmad Syaikhulmuhammad, hadir dalam kunjungan Dubes AS ke Kantor DPP PKS diantaranya Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Bendahara Umum Mahfud Abdurrahman, dan Ketua DPP PKS Badan Pengembangan dan Pembinaan Luar Negeri Sukamta, serta Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan, Diah Nurwitasari

Kemitraan dengan negara maju seperti Amerika Serikat diharapkan bisa memberikan keuntungan tidak hanya di sisi ekonomi tetapi juga terkait iptek dan peningkatan kualitas SDM

H. SUKAMTA, Ph.D

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS



PKS Paparkan Alasan Usung
Anies Sebagai Capres

Rekam Jejak Mumpuni dan Nasionalis Religius

Jakarta– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden pada pemilu 2024, hal ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Syura VIII yang berlangsung di kantor DPTP PKS di Jakarta, pada Kamis (23/2/2023).

Dalam konferensi pers, Presiden PKS Ahmad Syaikhul menyampaikan langsung hasil dari MMS PKS ke VIII yang salah satunya adalah mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI dalam Pemilu 2024.

Syaikhul menyebut, sosok Anies Baswedan yang berkarakter nasionalis religius menjadi salah satu alasan PKS mengusung eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Saudara Anies Rasyid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis sekaligus

religius," ucap Syaikhul.

Jika kita membaca sejarah bangsa Indonesia, kita menyaksikan bahwa kakek beliau, AR Baswedan adalah salah satu pahlawan nasional dan pendiri bangsa yang berkontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di berbagai forum internasional, darah juang dan kepahlawanan Sang Kakek insyaAllah akan diwarisi oleh Saudara Anies Rasyid Baswedan," sambungnya.

Selain itu Syaikhul menyebut, Anies Baswedan

sosok yang dapat memadukan antara nilai nasionalisme dan nilai agama menjadi satu kesatuan dalam membangun bangsa.

"Saudara Anies Rasyid Baswedan adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dan Agama menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam membangun bangsa. Agama menjadi inspirasi nasionalisme, dan nasionalisme memuliakan agama," ujar Syaikhul.

Selain itu Anies Baswedan dinilai sosok yang mempunyai rekam jejak mumpuni ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saudara Anies Rasyid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan di DKI Jakarta. Keberhasilan tersebut membuat beliau layak untuk melanjutkan kiprah kepemimpinan di level nasional," kata dia.

Besarnya peluang memenangi Pilpres juga menjadi salah satu alasan PKS mengusung Anies terlihat dari berbagai lembaga survei yang menempatkannya diposisi atas.

"Tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas, Saudara Anies Rasyid Baswedan juga memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi Pemilihan

Umum Presiden tahun 2024," terang Syaikhul.

Lebih jauh, PKS berharap Anies Baswedan dapat melanjutkan cita-cita pendiri bangsa mewujudkan keadilan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

"Di pundak Saudara Anies Rasyid Baswedan, PKS

berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan mengambil langkah pembaharuan kesinambungan dan kesinambungan," pungkasnya.



"Saudara Anies Rasyid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan di DKI Jakarta. Keberhasilan tersebut membuat beliau layak untuk melanjutkan kiprah kepemimpinan di level nasional,"

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS



Diusung sebagai Bacapres PKS

Anies Baswedan: Amanah Besar yang Diemban dengan Kerja Keras

Jakarta (23/02) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden, Anies menyebut dukungan tersebut sebagai sebuah amanah besar.

Hal itu disampaikan pada konferensi pers Musyawarah Majelis Syura VIII Partai Keadilan Sejahtera, pada Kamis (23/2/2023).

"Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera, ini sebuah amanah besar yang kami emban dengan teguh dan siap bekerja keras bersama dengan partai-partai pendukung untuk membawa perubahan bagi Indonesia," ucap Anies.

Anies menyebut, hubungan erat dengan PKS sudah terjalin lama tepatnya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.

"Dalam perjalanan 5 tahun bertugas di Jakarta, PKS mendampingi, mendukung, mengawal erat seluruh perjuangan di Jakarta," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016 ini.

"Ikhtiar kita untuk membawa perubahan, ikhtiar kita untuk bisa menghadirkan

kebahagiaan juga mengalami cobaan bahkan di masa-masa itu ada pandemi dan berbagai macam tantangan lainnya. Alhamdulillah bersama PKS kita sama-sama jaga," lanjutnya.

Lebih lanjut, Anies mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan simpatisan PKS atas kepercayaan sebagai Calon Presiden pada pemilu 2024

mendatang.

Anies meyakini kebersamaannya dengan PKS akan mengantarkan Indonesia kearah yang lebih baik.

"Terima kasih izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai ketua para wakil sekretaris dan anggota Majelis Syura yang saya hormati terima kasih kepada seluruh jajaran DPP kepada para kader pada relawan dan seluruh pendukung PKS Mari kita memulai sebuah perjalanan baru sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik," tutup Anies.






"Terima kasih izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai ketua para wakil sekretaris dan anggota Majelis Syura yang saya hormati terima kasih kepada seluruh jajaran DPP kepada para kader pada relawan dan seluruh pendukung PKS Mari kita memulai sebuah perjalanan baru sebuah perjalanan yang insya Allah akan bisa mengantarkan kita kepada Indonesia yang lebih baik,"

ANIES BASWEDAN

Bakal Calon Presiden 2024 - 2029



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***